

# LAKIP

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar



2021

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan, kami telah berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2021 ini yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, Aamiin.



Polewali, 01 Maret 2022

Mengetahui,

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

H. M. SUAIB NAWAWI, SKM, M.Kes

NIP. 19630927 198311 1 001

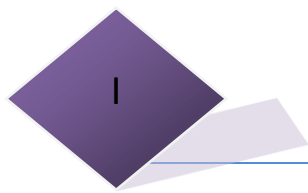


Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan. Dinas di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Polewali Mandar dalam pembangunan mempunyai visi RPJMD "POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA". Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, tujuan, dan sasaran, di bidang kesehatan misinya adalah "Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius", dengan tujuan "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia", serta sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat".

# DAFTAR ISI

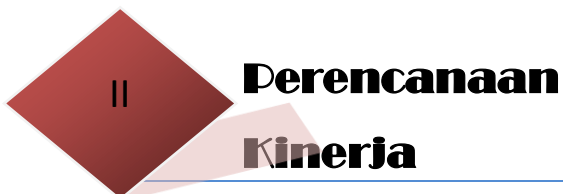
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Mandiri dan Partisipatif (26)



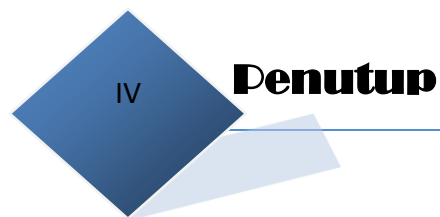
- A. Latar Belakang (6)
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (9)

Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kefarmasian, serta Sarana Prasarana Kesehatan (70)

B. Akuntabilitas Keuangan (74)



- A. Rencana Strategis (16)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2018 (21)



## Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

- A. Akuntabilitas Kinerja (26)



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **diartikan** sebagai dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penggunaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021. **Urgensi atau pentingnya** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dibuat.

**Subtansi** Muatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar adalah program dan kegiatan yang harus dicapai selama tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Renja tahun 2021 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun (2019-2023) sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya disusunah dicapai” (*Output and outcome Realitation*).

**Proses** **penyusunan** Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

tahun 2021, Penetapan Kinerja Tahun 2021 dalam format Perjanjian Kinerja Tahunan, pemantauan dan monitoring pelaksanaannya, kemudian dinilai berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun dan laporan program dan kegiatan lainnya berupa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di keluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **diartikan** sebagai dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penggunaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021. **Urgensi atau pentingnya** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang dibuat, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021, dan kemudian dinilai berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.



**Subtansi Muatan Laporan**  
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar adalah program dan kegiatan yang harus dicapai selama tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Renja tahun 2021 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun (2019-2023) sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya disusun dengan orientasi “Apa yang telah dicapai” (*Output and outcome Realitation*).

**Proses penyusunan Laporan**  
Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021, Penetapan Kinerja Tahun 2021 dalam format Perjanjian Kinerja Tahunan, pemantauan dan monitoring pelaksanaannya, kemudian dinilai berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan laporan program dan kegiatan lainnya berupa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di keluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023.

yang dilakukan pada tahun anggaran 2021.

## **2. Maksud**

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;
- b. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan.
- c. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi

## **b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1.1.1 3. Tujuan**

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah:

- a. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar kepada Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan pihak yang berkepentingan, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.
- c. Memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

### **1. Kedudukan Organisasi Dinas Kesehatan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dalam organisasi pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan bupati Polewali Mandar nomor 34 tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dengan penyelenggaraan fungsi :

1. Perumusan kebijakan kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut, SKPD Dinas Kesehatan telah dilengkapi dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi,



sumber daya, tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pelayanan, masing-masing dapat diuraikan dibawah ini.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. Pembinaan Unit Pelayanan Teknis.

## **2. Tugas Pokok Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **3. Fungsi Dinas Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam poin 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan tehnis Pemerintah Kabupaten dibidang kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan dan farmasi, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- b. Pelaksanaan kebijakan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dan farmasi, pembinaan rumah sakit dan
- c. puskesmas, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## GAMBARAN UMUM

### A. Geografi/Geografi

#### Letak dan Luas

Kabupaten Polewali Mandar yang beribukota di Polewali terletak antara  $3^{\circ} 4' 10''$  -  $3^{\circ} 32' 00''$  Lintang Selatan dan  $118^{\circ} 40' 27''$  -  $119^{\circ} 29' 41''$  Bujur Timur, Kabupaten Polewali Mandar wilayahnya berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa

Sebelah Timur : Kabupaten Pinrang

Sebelah Selatan : Teluk Mandar- Selat Makassar

Sebelah Barat : Kabupaten Majene

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 Km<sup>2</sup> yang meliputi 16 (lima belas) kecamatan, dimana Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas wilayah 356,93 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bulu dengan luas 241,93 Km<sup>2</sup> merupakan 2 (dua) kecamatan yang terluas di Kabupaten Polewali Mandar ini. Luas kedua kecamatan tersebut 29,58 % dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah 21,34 Km<sup>2</sup>.

#### 2. Topografi

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi, rendah dan pesisir pantai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar Mandar dan Maloso. Kecamatan yang letaknya dibagian utara pada umumnya memiliki perbukitan dan pegunungan yang berpotensi dijadikan cadangan untuk ekosistem guna mendukung pembangunan berwawasan lingkungan

sedangkan Kecamatan yang terletak dibagian selatan yang memiliki garis pantai adalah dataran rendah yang berpotensi untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan daratan dan laut.

#### 3. Iklim

Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar jumlah curah hujan di Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sepanjang tahun 2012 adalah 2.361,00 mm (dirinci dalam mm) atau sebanyak 147 hari (dirinci dalam hari).

#### 4. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menaungi 16 Kecamatan dengan 144 Desa 23 Kelurahan, sehingga jumlah total Desa dan Kelurahan yang ada yaitu 167. Dari 167 desa dan kelurahan yang ada tersebut terdapat 706 dusun , Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 2 Kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak, Kecamatan Campalagian terdiri dari 17 desa dan 1 Kelurahan, Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Tapango masing – masing terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai jumlah desa dan kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga yang hanya hanya memiliki 6 desa dan 1 kelurahan.

# Situasi Derajat Kesehatan

Jumlah kematian Bayi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang naik dan turun, masih terdapat beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam upaya menurunkan angka kematian bayi di kabupaten Polewali Mandar. Jumlah kematian Bayi di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2013 sebanyak 95 bayi, sedangkan pada tahun 2014 turun ke angka 85 bayi, dan tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan 109 kematian bayi. Pada tahun 2016 turun ke 103 kematian bayi dan di tahun 2017 ditemukan sebanyak 93 bayi yang meninggal sebelum ulang tahun pertamanya dari 8.322 kelahiran hidup. Tahun 2013 terjadi penurunan angka kematian bayi dari tahun sebelumnya, dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 8355 ditemukan jumlah kematian sebanyak 95 bayi, sampai pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 85 kematian bayi dari 7694 jumlah kelahiran hidup atau 11 per 1000 kelahiran hidup. Namun pada Tahun

kematian bayi atau sekitar 12 per 1000 kelahiran hidup, jumlah kematian bayi dengan Angka ini sebenarnya sudah cukup baik, karena jika menggunakan standar pencapaian SDGs bahwa angka kematian bayi dibawah 12 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2017 jumlah kelahiran hidup 8322 di temukan 118 jumlah kematian bayi atau sekitar 14 per 1000 kelahiran hidup, jumlah kematian bayi dengan Angka ini sebenarnya sudah cukup baik, karena jika menggunakan standar pencapaian SDGs bahwa angka kematian bayi dibawah 12 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2018 dan 2019 AKB sebesar 11 per 1000 Kelahiran Hidup. Tahun 2020 Angka Kematian Bayi sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2021 AKB sebesar 10 per 1000 Kelahiran Hidup. Angka ini telah di bawah standar nasional. Kematian bayi disebabkan oleh factor klinis dan factor non klinis, sehingga kematian bayi terus mendapat perhatian baik dari petugas kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan juga adanya keterlibatan antar sektoral dalam hal ini keterlibatan Pemerintah Setempat dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi.

### **b. AKABA / Child Mortality Rate (CMR)**

Angka Kematian Anak Balita (usia 1-5 tahun) juga menjadi perhatian di bidang kesehatan, berdasarkan Laporan Tahunan KIA hanya ada 6 kematian anak balita ditahun 2007 dan 3 kematian ditahun 2008, sementara di tahun 2009 tidak ada laporan tentang kematian anak balita. Ditahun 2010 ditemukan 4 Kematian Anak Balita dan tahun 2011 hanya dilaporkan 1 kematian anak balita, ditahun 2012 terlapor hanya ada 2 kematian anak balita (1-5 tahun) sedangkan tahun 2013 yang dilaporkan ada 5 kematian anak balita (1 – 5 tahun). Jumlah ini belum dapat memberikan gambaran salah satu indikator status kelangsungan hidup di suatu wilayah karena data yang terlaporkan belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Pada Tahun 2014 yang dilaporkan ada 7 kematian anak balita( 1 – 5 tahun ), angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan ditahun 2015 mengalami penurunan, ada 6 jumlah kematian anak balita. Tahun 2016 mengalami peningkatan, ada 7 jumlah kematian anak balita. Serta Tahun 2017 terdapat 7 kematian anak balita, sedangkan angka kematian balita sebesar 1 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2020 Angka Kematian Balita sebesar 1 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2021 Angka Kematian Balita sebesar 1 per 1000 kelahiran hidup.

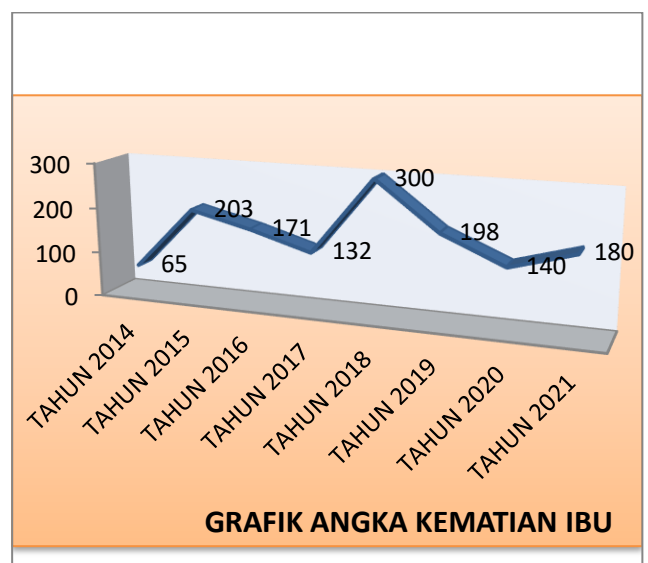
### **c. AKI/ Maternal Mortality Rate (MMR)**

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2013 tercatat 11 kematian ibu. Untuk tahun 2014, tercatat 5 kematian ibu. Ditahun 2015 ditemukan sebanyak 17 kematian ibu dan tahun 2016 masih tetap ditemukan sebanyak 14 kematian ibu. Dengan upaya-upaya penurunan Kematian Ibu di Kabupaten Polewali ditahun 2017 hanya bisa ditekan menjadi 11 Kematian ibu dari 8.322 kelahiran hidup.

Berdasarkan Laporan Tahunan KIA ditemukan Penyebab kematian Ibu pada tahun 2011 didominasi oleh faktor perdarahan yaitu 8 dari 13 kematian ibu (61.5%) kemudian disusul oleh penyebab yang lainnya, sedangkan pada tahun 2013 jumlah kematian ibu di dominasi oleh factor perdarahan yaitu 8 dari 11 kematian ibu (72,7%) dan 3 dari 11 kematian ibu (27,7%) di sebabkan oleh factor Eklampsia. Pada tahun 2014 jumlah kematian Ibu di dominasi oleh faktor perdarahan 2 dari 5 kematian ibu (40%), Hipertensi 1 dari 5 kematian ibu (20%), dan factor lain –lain 2 dari kematian ibu (40%), tahun 2015 jumlah kematian ibu didominasi oleh faktor pendarahan 8 dari 17 kematian ibu ( 47% ), hipertensi 3 dari 17 kematian ibu ( 17% ), penyakit jantung 2 dari 17 kematian ibu ( 12% ) dan faktor lain – lain 4 dari 17 kematian ibu ( 24% ). Pada Tahun 2017 penyebab terbanyak kematian ibu adalah perdarahan sebanyak 6 dari 11 kasus kematian ibu (54%), kasus preklampsia sebanyak 2 (18%), demam sebanyak 1 (9%),

eklampsia sebanyak 1 (9%), dan kasus sesak napas sebanyak 1 (9%). Tahun 2014 kematian ibu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, secara Nasional Angka kematian ibu di Polewali Mandar masih terlalu tinggi (137 per 100.000 kelahiran hidup) bila dibandingkan dengan target 102 per 100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai ditahun 2015 atau sekitar hanya 8 kematian ibu, dan di tahun 2014 angka kematian ibu sudah berada di bawah target yaitu 5 kematian Ibu, semua ini tidak terlepas dari peran serta dan tanggung jawab petugas kesehatan dan pihak terkait yang sangat membantu dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, keterlibatan pihak keluarga juga sangat mendukung dalam upaya menurunkan angka kematian ibu terutama untuk Pemeriksaan ANC, Persalinan di sarana pelayanan kesehatan, pertolongan oleh Nakes, PNC, dan faktor lain yang sangat mendukung. Tahun 2016 jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 14 kematian ibu atau 132 per 100.000 kelahiran hidup. Angka menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, penyebab kematian ibu antara lain disebabkan oleh factor pendarahan, hipertensi, dan lain – lain. Tahun 2017 Angka kematian ibu mengalami peningkatan menjadi 171 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2018 Angka kematian ibu mengalami peningkatan menjadi

300 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2019 Angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 198 per 100.000 Tahun 2020 Angka Kematian Ibu sebesar 140 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2021 Angka Kematian Ibu sebesar 180 per 100.000 kelahiran hidup.



Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar **diartikan** sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar perlu segera melakukan revisi dokumen Renstra karena beberapa alasan, antara lain : (1) Adanya perubahan kebijakan nasional seiring dengan terbitnya RPJM Nasional tahun 2019-2023, dimana RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2023 di-Perdakan sebelum terbitnya RPJM Nasional; (2) Adanya perubahan metode pengukuran

beberapa indikator kinerja utama, seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan IPM yang berdampak terhadap penetapan target kinerja; (3) Adanya penambahan atau perubahan indikator kinerja akibat terjadinya perubahan konsep, seperti angka Harapan Lama Sekolah, PNB perkapita, dan sebagainya; (4) Adanya sejumlah indikator kinerja pembangunan nasional yang seyogyanya diakomodir di dalam dokumen RPJMD;

Tahun 2016 terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang mengharuskan perubahan atau revisi dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023.

“POLEWALI MANDAR  
MAJU, RAKYAT  
SEJAHTERA”

**VISI PEMKAB  
POLEWALI  
MANDAR**

**MISI  
BIDANG KESEHATAN**

Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius

**MISI RPJMD  
BIDANG KESEHATAN**

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

**SASARAN RPJMD  
BIDANG KESEHATAN**

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian visi dan implementasi misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan serta sasaran dan Indikator Sasaran Renstra. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealis dan mempunyai jangkauan kedepan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta didasarkan pada isu-isu strategik. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi di atas, dirumuskan Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah sebagai berikut :





## PROGRAM

### Program

**PEMENUHAN UPAYA  
KESEHATAN  
PERORANGAN DAN  
UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT**

### INDIKATOR PROGRAM:

**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Pustu)**

**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Puskesmas)**

**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat kesehatan)**

**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Puskesmas keliling)**

**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Poskesdes)**

**Persentase puskesmas dengan status akreditasi :**

- Dasar

- Madya

- Utama

- Paripurna

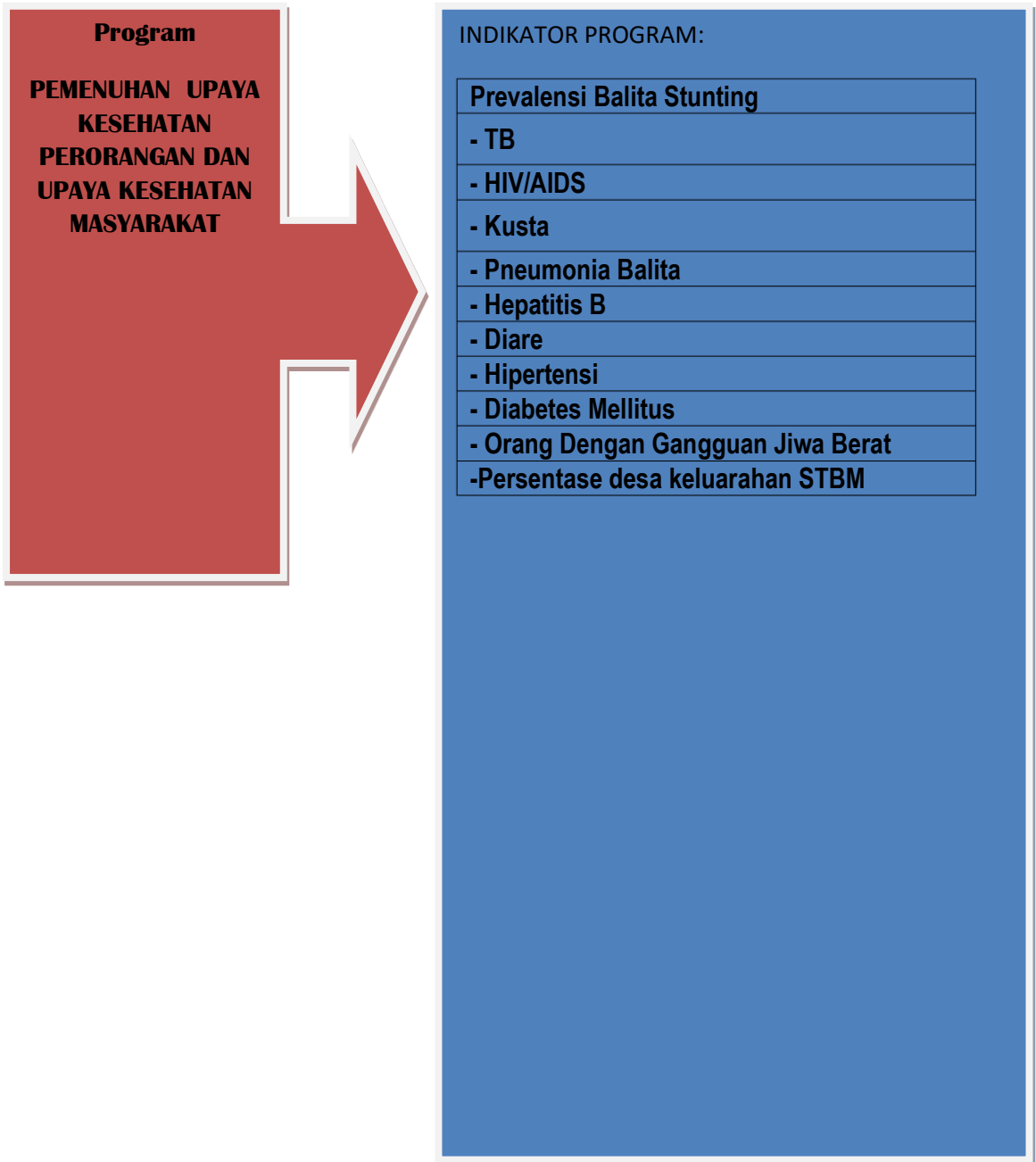
**Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan**

**Angka kematian ibu**

**Angka kematian bayi**

**Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi**

**Persentase Desa/ Kelurahan STBM**





**INDIKATOR PROGRAM :**  
**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat kesehatan)**



**INDIKATOR PROGRAM :**  
**Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**



**INDIKATOR PROGRAM :**  
**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu**

# Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan Rencana Strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan Penetapan Kinerja ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan Tujuan Khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Nomor	Sasaran Strategis OPD (Kepala OPD)	Indikator Sasaran Renstra	Kondisi Awal (2018)	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB	A
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Ketersediaan Obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan bahan medis habis pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang mandiri dan partisipatif	Indeks Keluarga Sehat	Tidak Sehat	Pra Sehat	Pra Sehat	Pra Sehat	Pra Sehat	Pra Sehat
7	Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Case Fatality Rate Penyakit Potensial Wabah	17%	0%	0%	0%	0%	0%

# Target Kegiatan/ Sub Kegiatan

## Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

### Tahun 2021

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan	Satuan	Target	
			Kinerja	Rp
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP</b>	<b>PERSEN</b>		<b>34,737,100,587</b>
<b>Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</b>	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	UNIT	2	1,889,226,300
<b>Pengembangan Puskesmas</b>	Jumlah Puskesmas yang dibangun	UNIT	1	8,558,645,150
<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	Jumlah Puskesmas, jejaring, dan jaringannya yang direhabilitasi (Puskesmas Pembantu)	UNIT	2	2,396,527,281
<b>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	PAKET	6	1,443,615,700
<b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	JENIS	230	11,993,698,656
<b>Pengadaan Obat, Vaksin</b>	Jumlah jenis item obat yang disediakan/Obat esensial	JENIS	365	8,390,972,500
<b>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi atau pemeliharaan	UNIT	20	64,415,000
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/ Kabupaten</b>	<b>PERSEN</b>		<b>103,586,628,796</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	Persentase Balita Kurus mendapat perawatan	<b>PERSEN</b>	100	1,091,233,140
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</b>	Jumlah FKTP yang bersinergi dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	UNIT	20	38,545,100
<b>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>	Persentase Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage)	PERSEN	95,5	68,887,907,230
<b>Operasional Pelayanan Puskesmas</b>	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	DOKUMEN	12	23,833,619,823
<b>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	Persentase Pelayanan Kunjungan di RS Wonomulyo	PERSEN	100	1,000,000,000

<b>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	JUMLAH Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Rupiah	250,000,000	150,923,910
<b>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</b>	Persentase FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	PERSEN	100	1,317,821,000
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	Persentase Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	66,243,680
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>	Persentase Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	1,708,626,000
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	Persentase Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	72,820,378
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>	Persentase Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	36,178,710
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	17,000,003
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>	Persentase Pelayanan Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59 Th)	PERSEN	100	103,886,860
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>	Persentase Penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	37,505,000
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	Persentase Penduduk dengan Hipertensi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	15,829,645
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</b>	Persentase Penduduk dengan Diabetes mellitus yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	9,000,000
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</b>	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan Standar	PERSEN	100	50,210,800
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>	Persentase penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	77,997,465
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</b>	Persentase penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	59,248,479

<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	<b>Unit</b>	20	51,312,521
	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	<b>PERSEN</b>		
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>	Jumlah Desa ODF / Desa Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (SBS)	<b>DESA</b>	55	153,000,000
<b>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direpson	<b>PERSEN</b>	100	47,369,920
<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<b>PERSEN</b>	100	212,686,822
<b>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Massal)</b>	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	<b>PERSEN</b>	90	3,696,451,165
<b>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</b>	Persentase Desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dibawah 24 jam	<b>PERSEN</b>	100	851,211,145
Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<b>Persentase Pelaporan berbasis manual dan elektronik yang dilaporkan</b>	<b>PERSEN</b>		<b>138,760,000</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</b>	Jumlah Aplikasi dan Pelaporan yang dikelola	<b>LAPORAN</b>	8	108,760,000
<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang di pantau pada aplikasi kawal ibu hamil	<b>ORANG</b>	9274	30,000,000
Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	<b>Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe D yang melaksanakan pelayanan kesehatan</b>	<b>100%</b>		<b>88,454,900</b>
<b>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	<b>UNIT</b>	20	40,332,900
<b>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	Jumlah Puskesmas yang terkoneksi dengan SISRUITE	<b>UNIT</b>	20	48,122,000
Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<b>Persentase Apotek, Toko Obat dan optikal, UMOT yang memiliki izin</b>	<b>100%</b>		<b>15,000,000</b>
<b>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Jumlah Puskesmas, Apotek, dan Toko Obat yang dilakukan pembinaan (Sarana Toko Obat)	<b>UNIT</b>	65	15,000,000
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	<b>Persentase Industri Rumah Tangga Produk Makanan dan Minuman yang memiliki izin</b>	<b>100%</b>		<b>498,558,600</b>

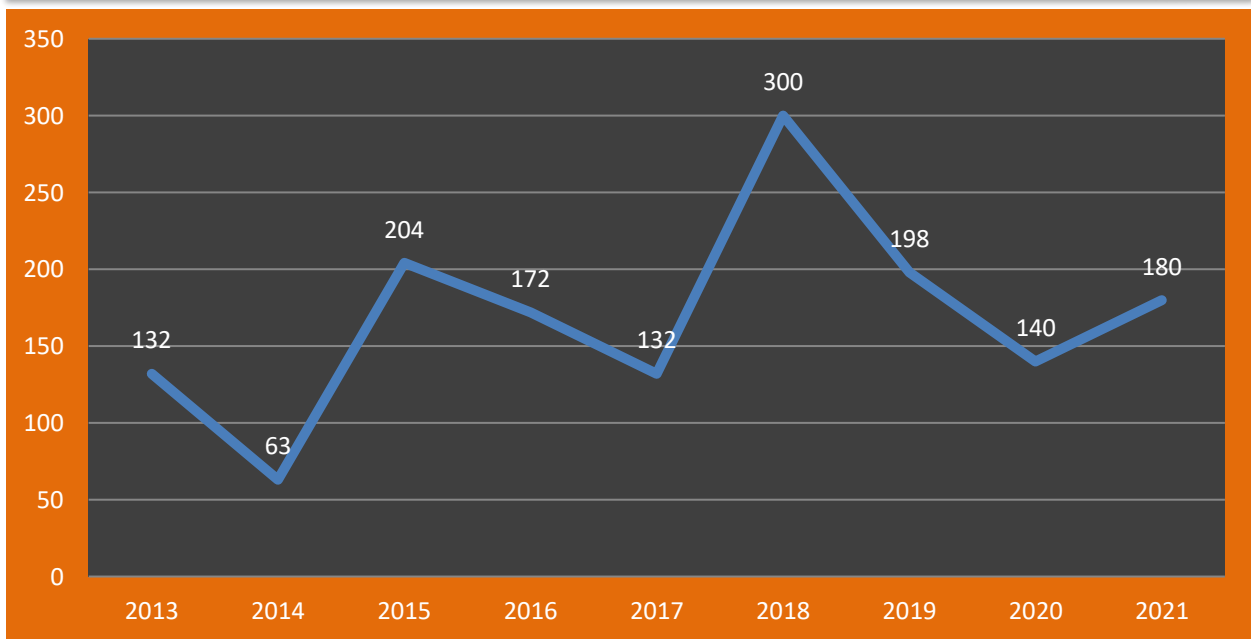


<b>Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	UNIT	70	498,558,600
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran, dan Depot Air Mimum (DAM)	<b>Persentase TPM dan DAM yang memiliki izin</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>
<b>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat	UNIT	55	0
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Desa Siaga Aktif</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>
<b>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	-		0
Pelaksanaan dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS</b>	<b>100%</b>		<b>390,752,955</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</b>		<b>PERSEN</b>		<b>390,752,955</b>
	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	DESA/KEL	167 DESA	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM+Q189</b>	<b>100%</b>		<b>78,000,000</b>
<b>Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	Jumlah Posyandu strata Mandiri	UNIT	32 UNIT	78,000,000
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>57,634,420,742</b>
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tingkat Daerah	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun</b>	<b>100%</b>		<b>109,802,400</b>
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	28,053,200
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</b>	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	42,560,000
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas Kinerja SKPD</b>	Jumlah dokumen LAKIP	Dokumen	1	17,482,400
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	21,706,800

Administrasi Keuangan	<b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>	<b>100%</b>		<b>55,976,218,342</b>
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah pegawai	jumlah	820	52,885,020,742
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	Jumlah tenaga kontrak daerah	jumlah	108	3,040,800,000
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	20,698,800
<b>Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	29,698,800
Administrasi Umum Perangkat daerah	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang di susun</b>	<b>100%</b>		<b>112,840,000</b>
<b>Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	LPD	47	112,840,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang di susun</b>	<b>100%</b>		<b>201,400,000</b>
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	BULAN	12	159,200,000
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	Orang	4	42,200,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang di susun</b>	<b>100%</b>		<b>1,234,160,000</b>
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan pajak kendaraan	Unit	4	124,160,000
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit	1	10,000,000
<b>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</b>	Jumlah pelayanan UTD dan PMI	<b>Unit</b>	2	1,100,000,000

**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**SITUASI ANGKA KEMATIAN IBU per 100.000 KH  
TAHUN 2013-2021**



Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

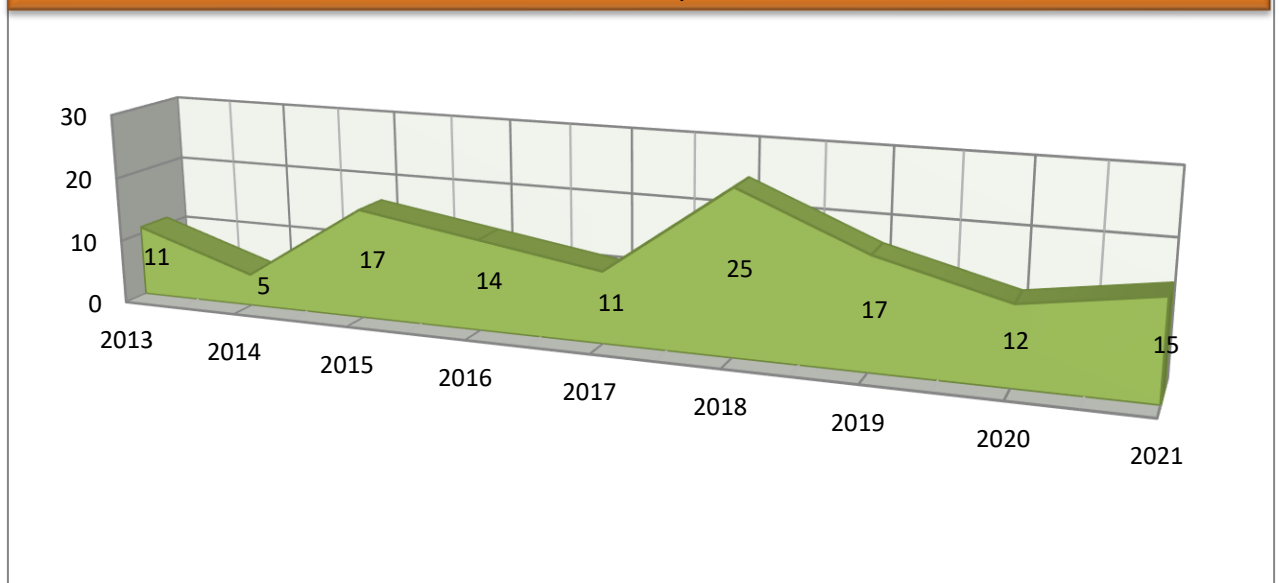
Kematian ibu menurut WHO adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia

kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Grafik di atas menggambarkan trend angka kematian ibu mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir, yakni dalam rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, namun terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu yang sangat besar, hingga mencapai AKI 300 per 100.000 kelahiran hidup, atau dengan kata lain setia 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 300 kematian maternal (ibu). Tahun 2019 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan yang signifikan hingga 198 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2020 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan yaitu 140 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini diasumsikan dari setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 140 kematian ibu, atau dalam konstanta 10.000, maka setiap 10.000 kelahiran hidup terdapat 14 kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2021 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yaitu 180 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini diasumsikan dari setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 180 kematian ibu, atau dalam konstanta 10.000, maka setiap 10.000 kelahiran hidup terdapat 18 kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah diserukan secara global. SDGs disebut lebih komprehensif dan lebih menantang daripada Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) karena muatan isu-isunya yang juga jauh lebih kompleks. Dalam kaitannya dengan penurunan Angka Kematian Ibu, SDGs menargetkan AKI pada tahun 2030 dapat diturunkan hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup.

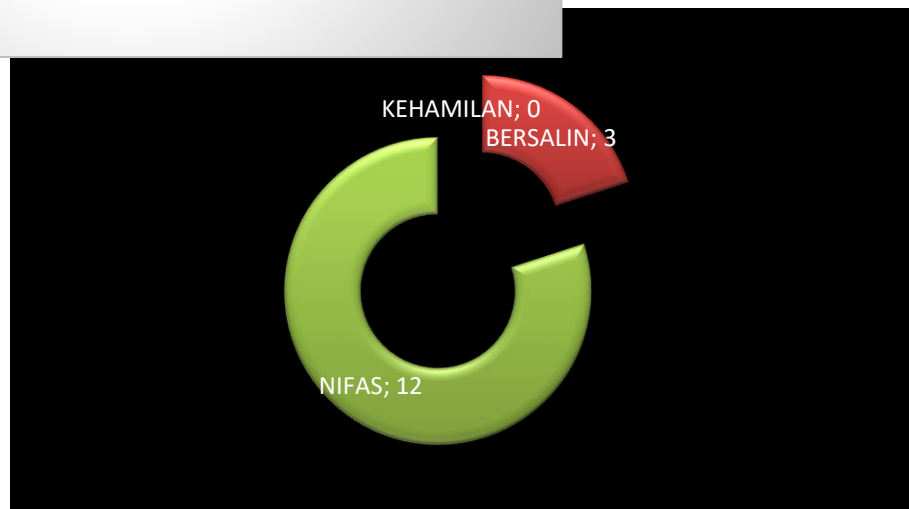
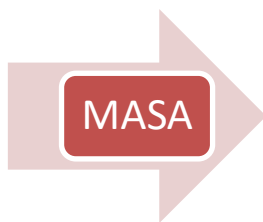
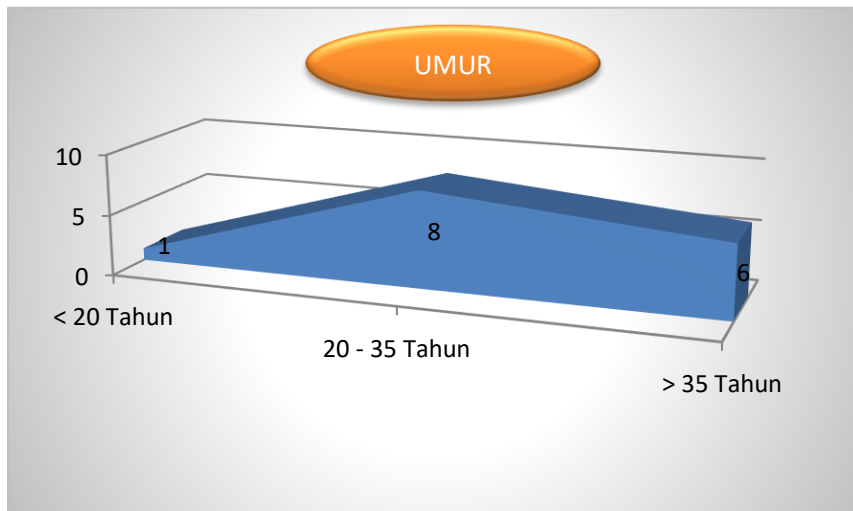
### SITUASI JUMLAH KEMATIAN MATERNAL (IBU) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 s/d 2021



Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman

Dari grafik di atas, terlihat peningkatan jumlah kematian maternal (ibu) di kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu 17 kematian maternal (ibu). Pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah kematian yang cukup signifikan yaitu sebanyak 12 kematian ibu. Sementara tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu sebanyak 15 kematian ibu di Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014). Untuk kasus Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Pusat Kesehatan dan Informasi Kemenkes (2014) penyebab utama kematian ibu dari tahun 2010-2013 adalah pendarahan (30.3% pada tahun 2013) dan hipertensi (27.1% pada tahun 2013). Hal ini sangat ironis, mengingat berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah, jika sang ibu mendapatkan perawatan medis yang tepat.



Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman

Grafik di atas menggambarkan karakteristik kematian maternal (ibu) di Kabupaten Polewali Mandar terbesar pada kisaran umur antara 20-35 tahun (8 kasus), serta 12 ibu meninggal pada masa nifas.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Polewali Mandar dalam 2 tahun terakhir berhasil diturunkan, namun terjadi peningkatan kematian ibu tahun 2021, dalam proses perjalanannya, beberapa Indikator penunjang Angka Kematian Ibu ini belum maksimal dan masih memiliki hambatan, antara lain:

## **HAMBATAN**

1. Tidak semua puskesmas memiliki rumah tunggu.
2. Jumlah ibu dengan kelahiran lebih dari 3 malu memeriksakan kehamilan, sehingga capaian K4 tidak mencapai target.
3. Beberapa daerah masih memiliki jarak tempuh yang jauh untuk sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Angka Drop Out KB yang masih tinggi.

## **SOLUSI**

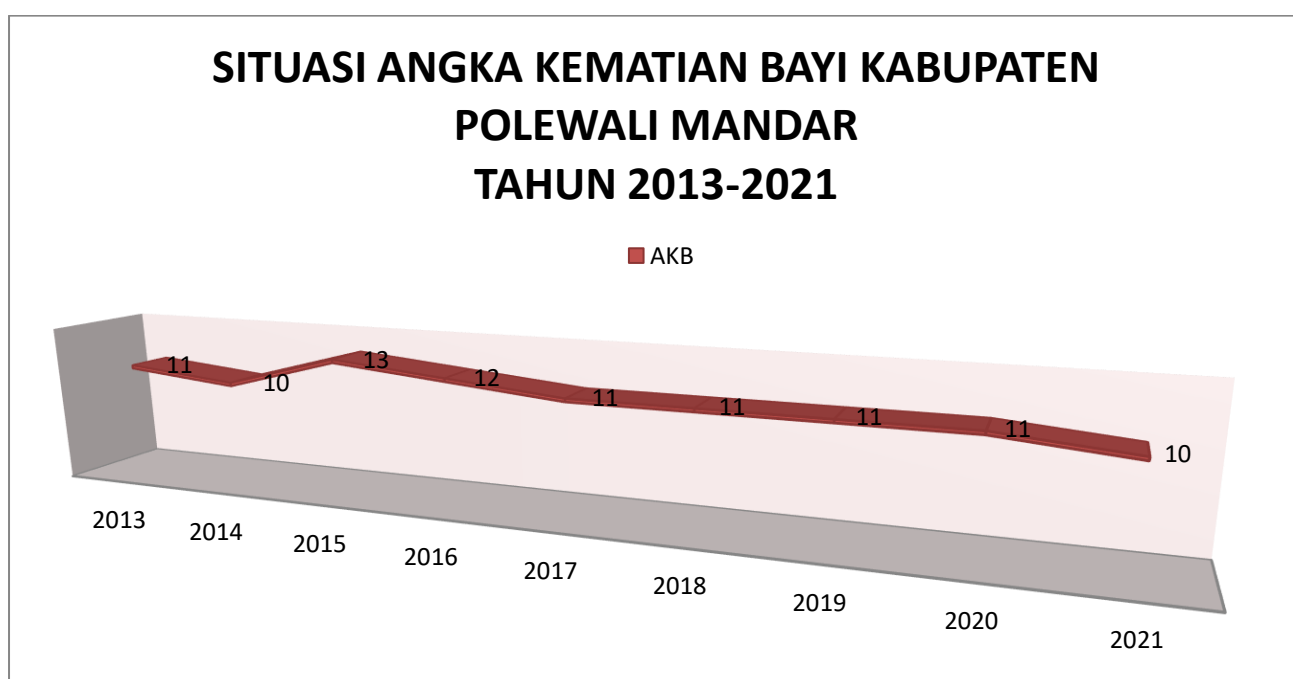
1. Menganggarkan operasional sewa rumah tunggu di setiap puskesmas
2. Melakukan advokasi kepada pemerintah desa, agar Alokasi Dana Desa sebagian digunakan untuk mengadakan kendaraan atau sewa kendaraan ibu hamil yang akan ke fasilitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan peran lintas sector dan lintas program, dalam upaya pengenalan kesehatan reproduksi remaja, dan KB.

## ANGKA KEMATIAN BAYI

Menurut WHO (World Health Organization) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 0-11 bulan per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu dalam kandungan dan luar kandungan. Kematian bayi dalam kandungan adalah kematian bayi yang dibawa oleh bayi sejak lahir seperti asfiksia. Sedangkan kematian bayi luar kandungan atau kematian post neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh dari luar.

Hingga tahun 2030 dalam Sustainable Development Goals menargetkan penurunan Angka Kematian Bayi hingga 12 per 1000 kelahiran hidup.

Data di atas menggambarkan jumlah kematian bayi dari tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan ke tahun 2019 yaitu sebanyak 85 bayi di Kabupaten Polewali Mandar meninggal sebelum mencapai ulang tahun pertamanya, sementara pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kematian bayi sebanyak 97 bayi. Tahun 2021 terjadi penurunan jumlah kematian bayi sebanyak 86 kasus kematian bayi.

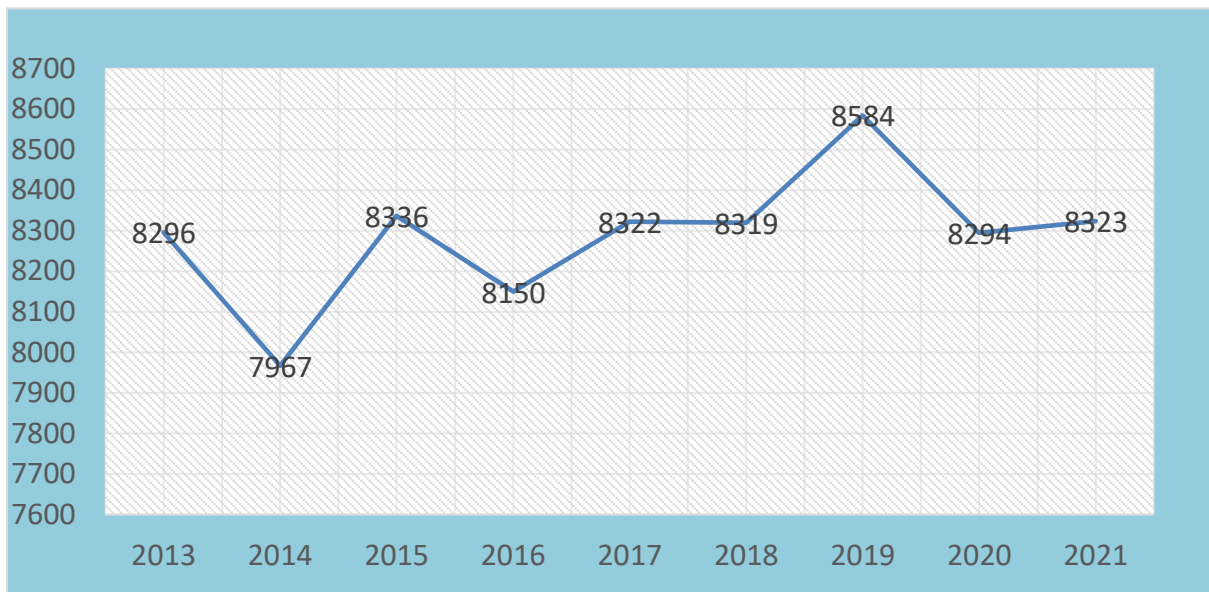


Sumber : Program KIA Dinkes Kab. Polman

Berdasarkan target perjanjian kinerja tahun 2021, Angka kematian bayi dapat diturunkan sesuai target yang ingin dicapai, dengan kata lain indikator ini berkinerja baik. Target yang dicapai sebesar 10 per 1000 kelahiran hidup, yang mengasumsikan dari setiap 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat 10 bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Target yang telah dicapai ini juga telah sejalan dengan target SDGs dimana SDGs menargetkan 12 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

JUMLAH KELAHIRAN HIDUP KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013-2021





**Kelahiran hidup adalah** ekspulsi lengkap atau ekstraksi suatu hasil fertilisasi dari ibunya, terlepas dari durasi kehamilan, di mana setelah pemisahan tersebut, bernafas atau menunjukkan bukti kehidupan lainnya seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot sukarela, terlepas dari apakah tali pusat telah dipotong atau masih melekat pada plasenta.

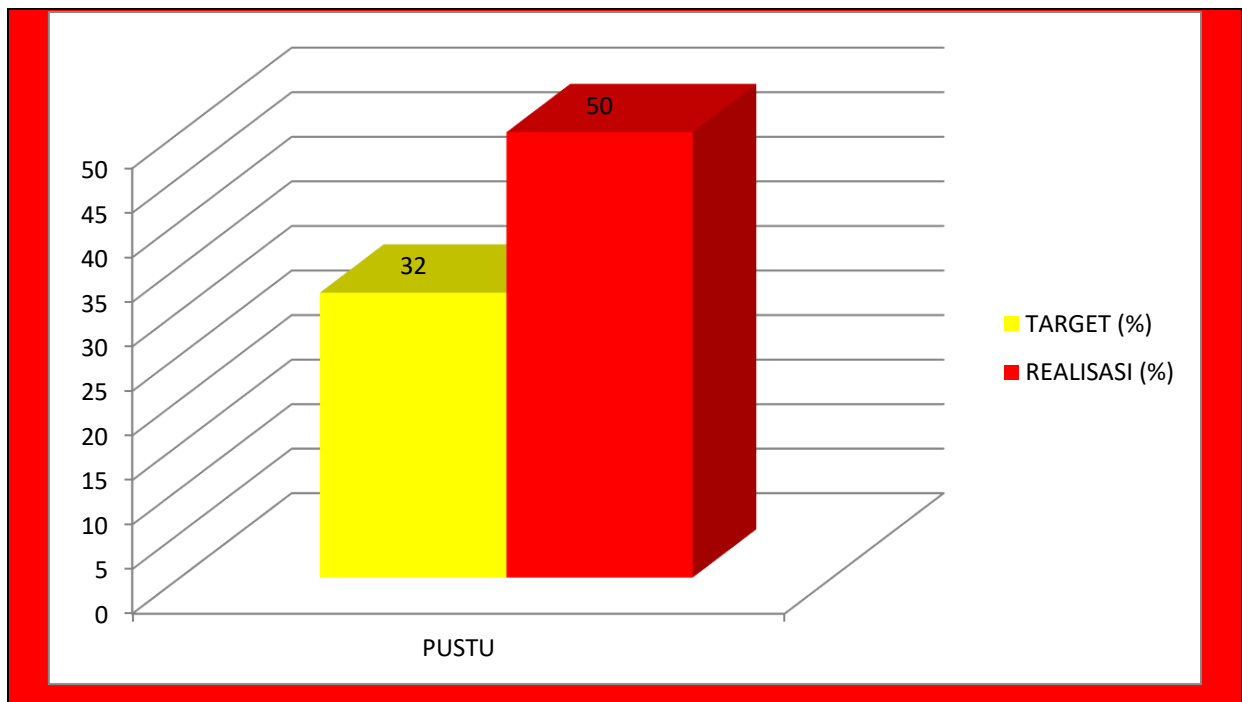
Grafik di atas menggambarkan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2013 menuju tahun 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 8584 kelahiran hidup. Tahun 2020 jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 8294 kelahiran hidup. Tahun 2021 jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 8323 kelahiran hidup.

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS KESEHATAN TAHUN 2021**

**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA  
KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 1**

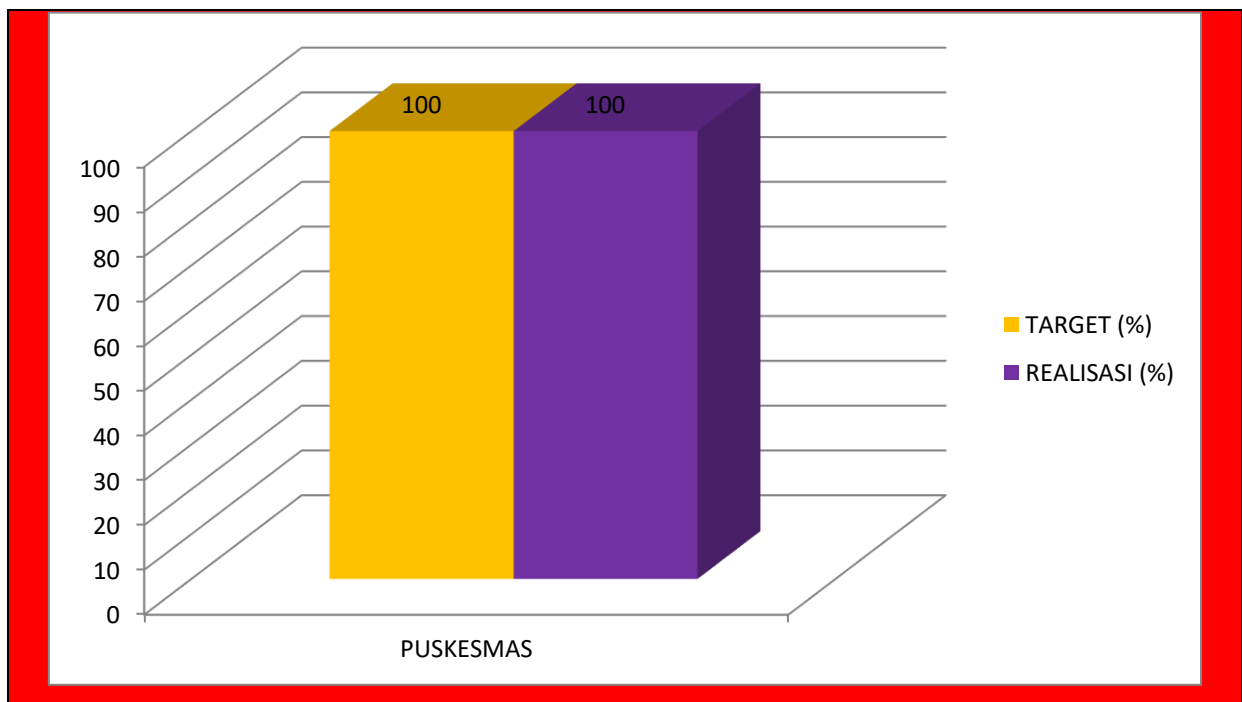
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan  
dalam kondisi baik (Pustu)



**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 2**

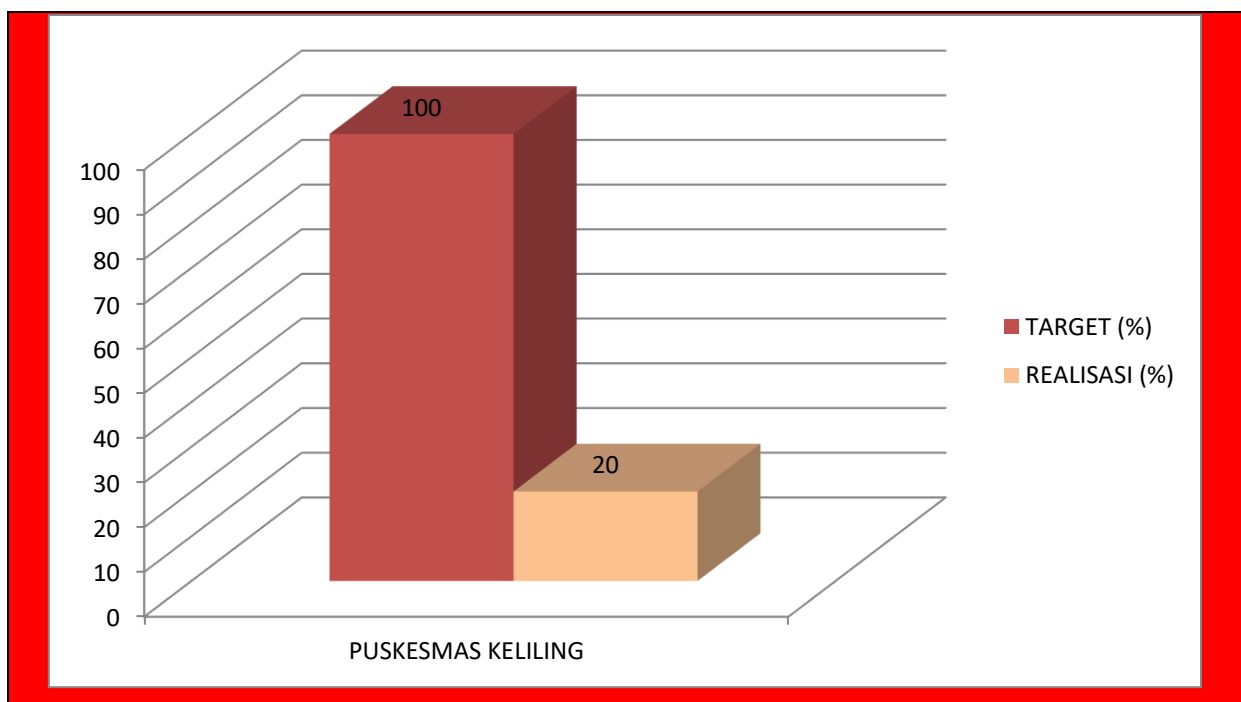
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Puskesmas)



**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 3**

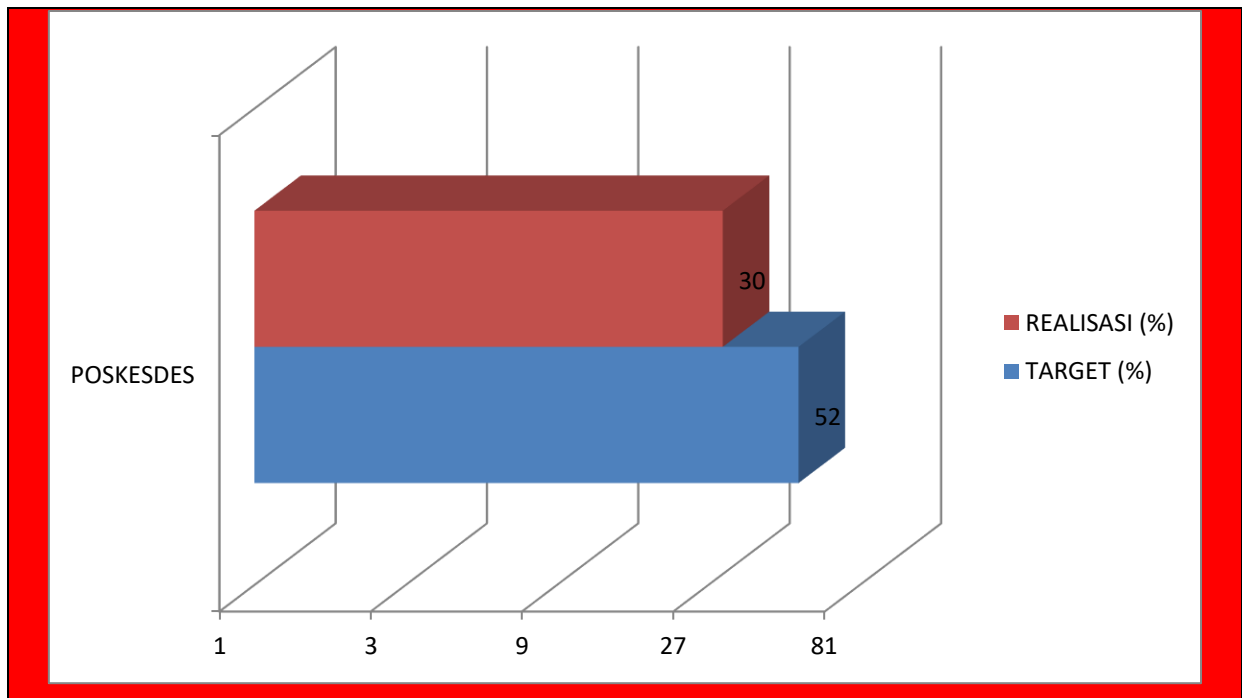
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Puskesmas keliling)



**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 4**

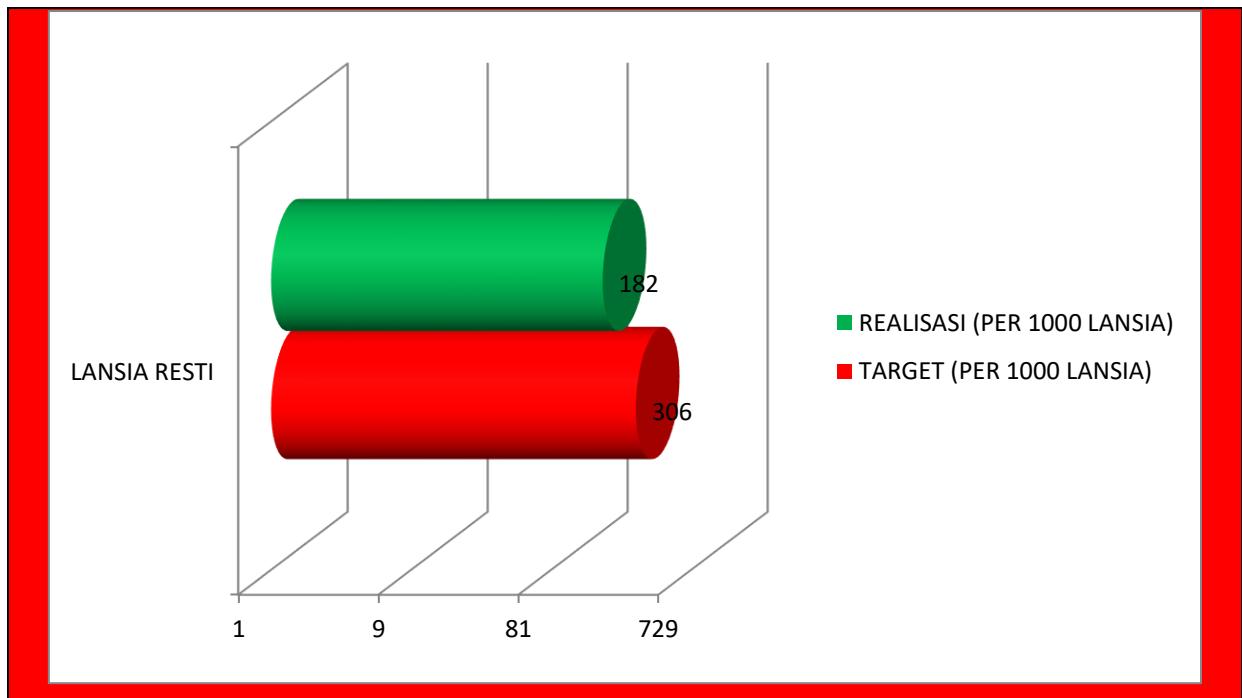
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Poskesdes)



**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 5**

Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi

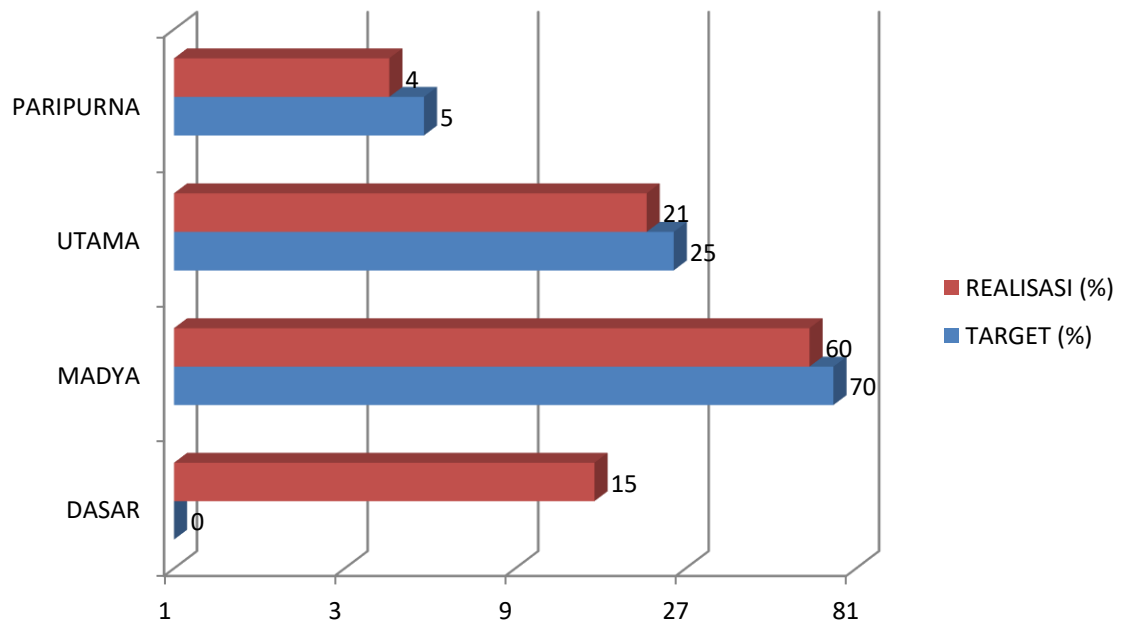


**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 5**

**Persentase puskesmas dengan status akreditasi :**

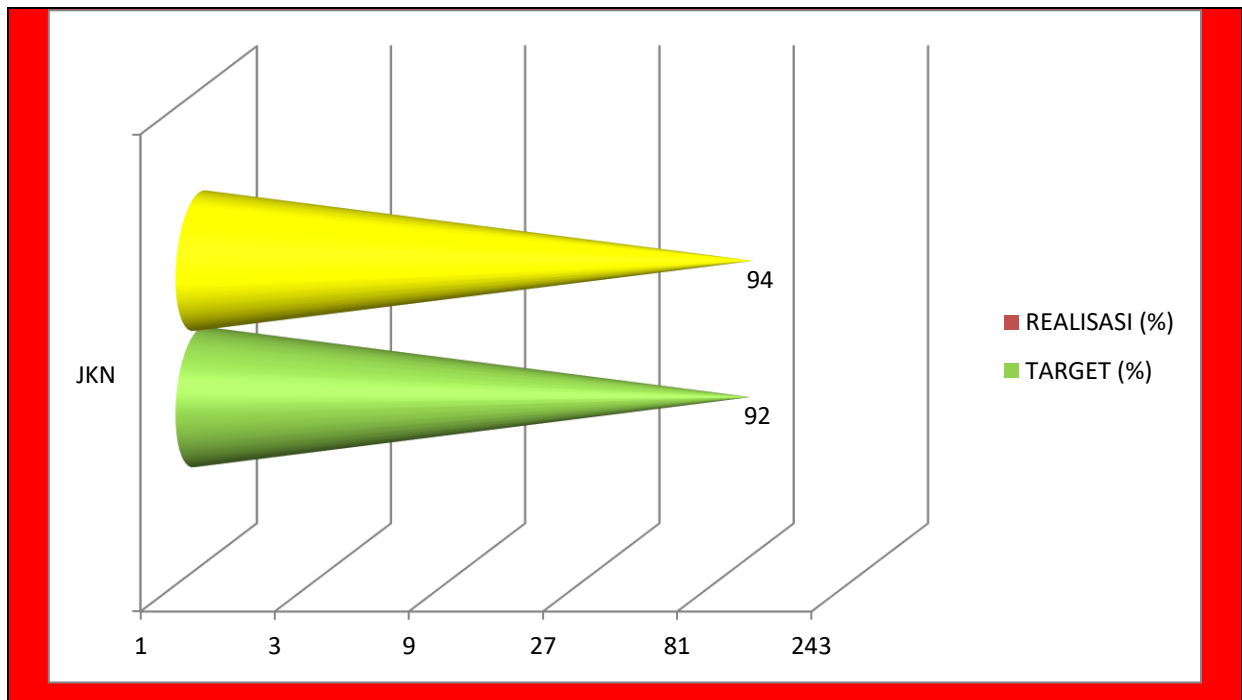
- Dasar
- Madya
- Utama
- Paripurna



**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 6**

Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan

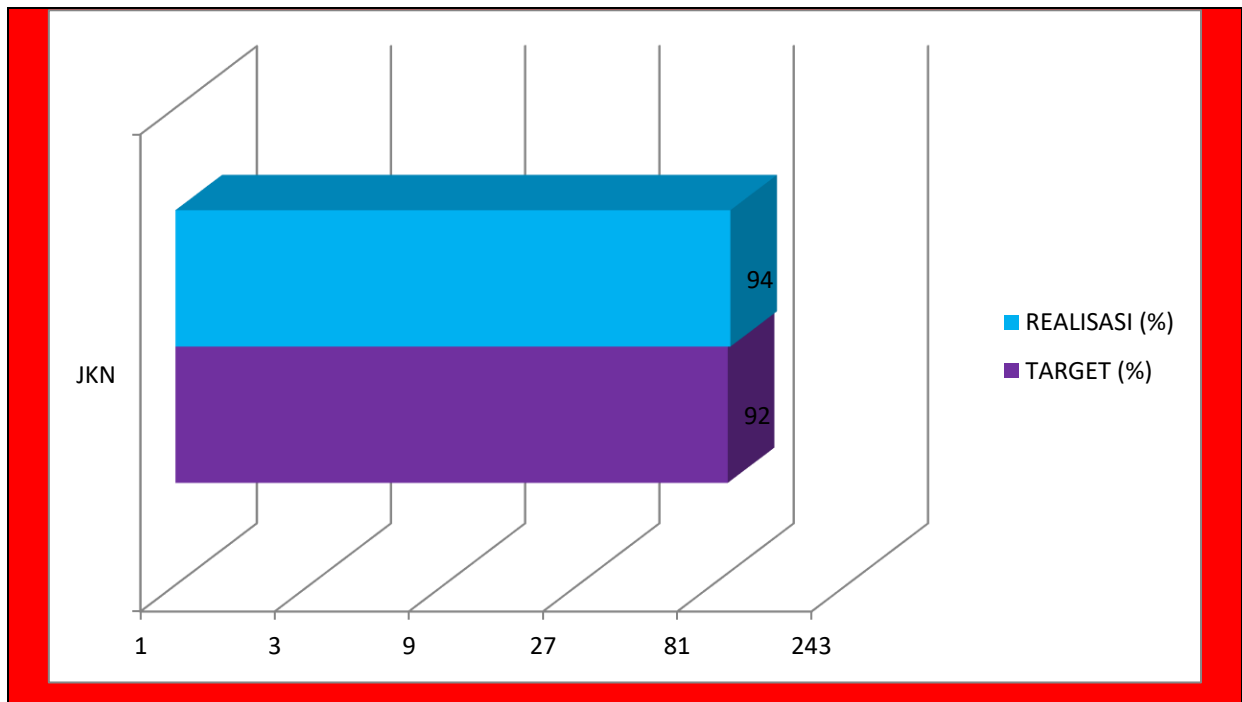




**PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**INDIKATOR 7**

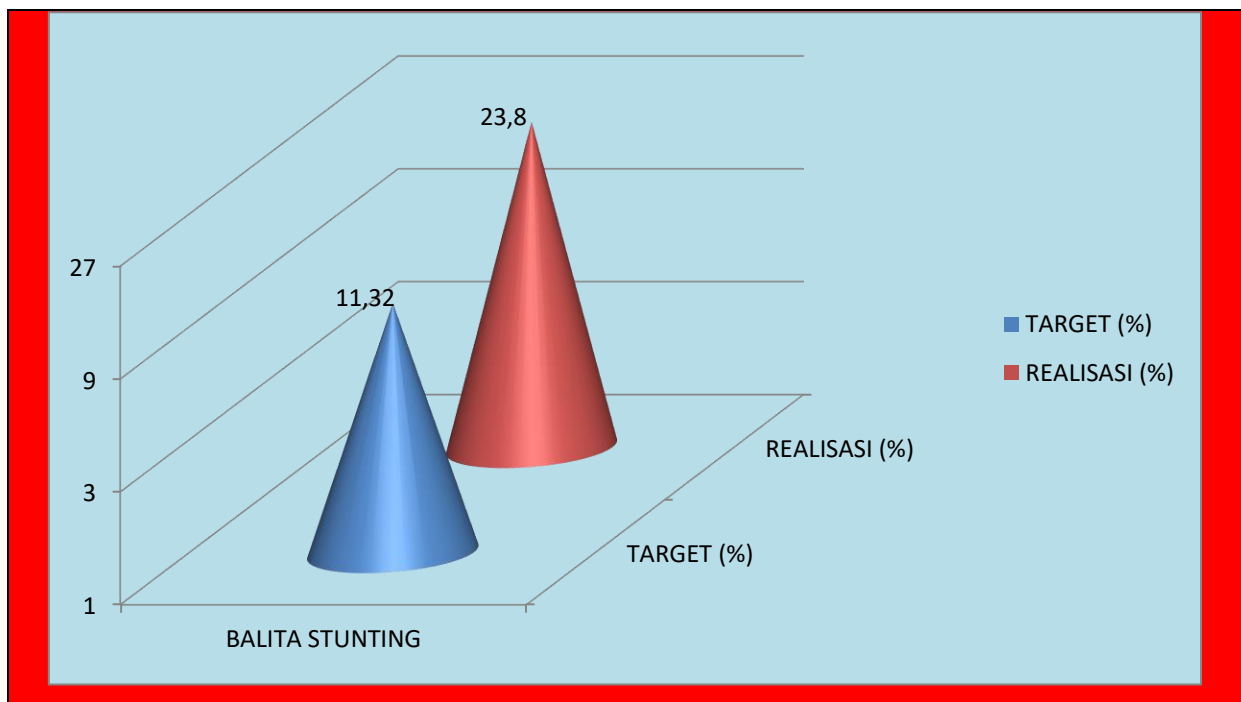
Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

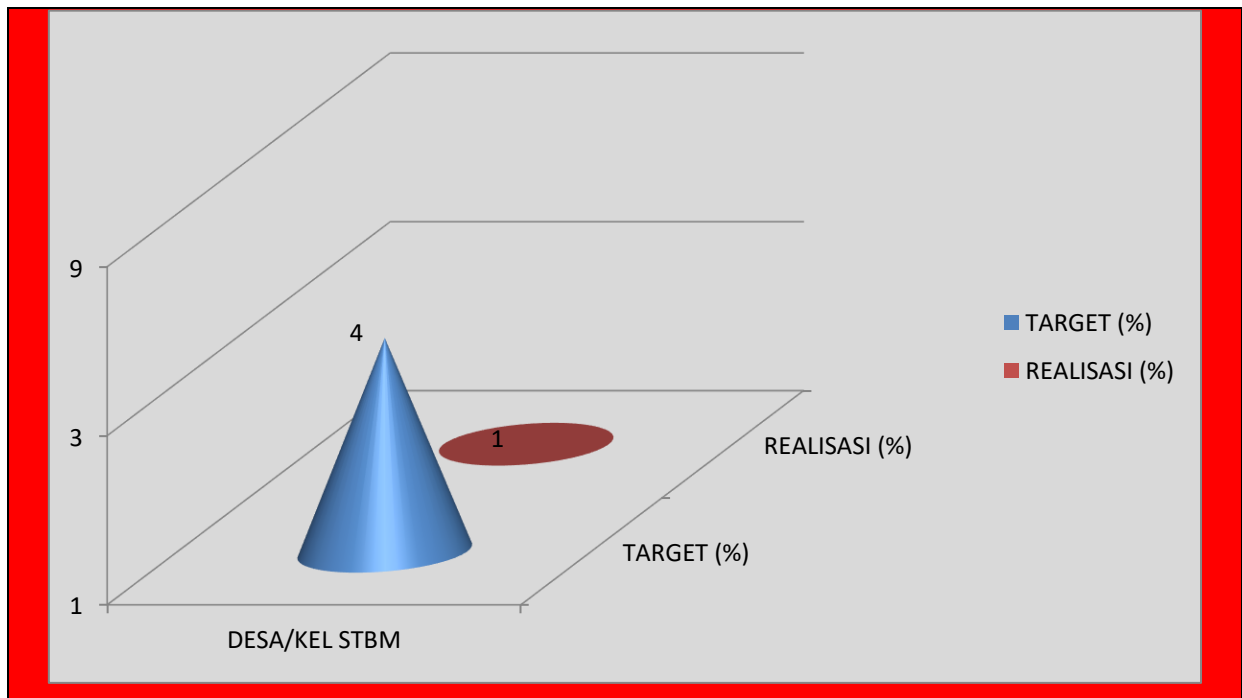
Prevalensi Balita Stunting



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

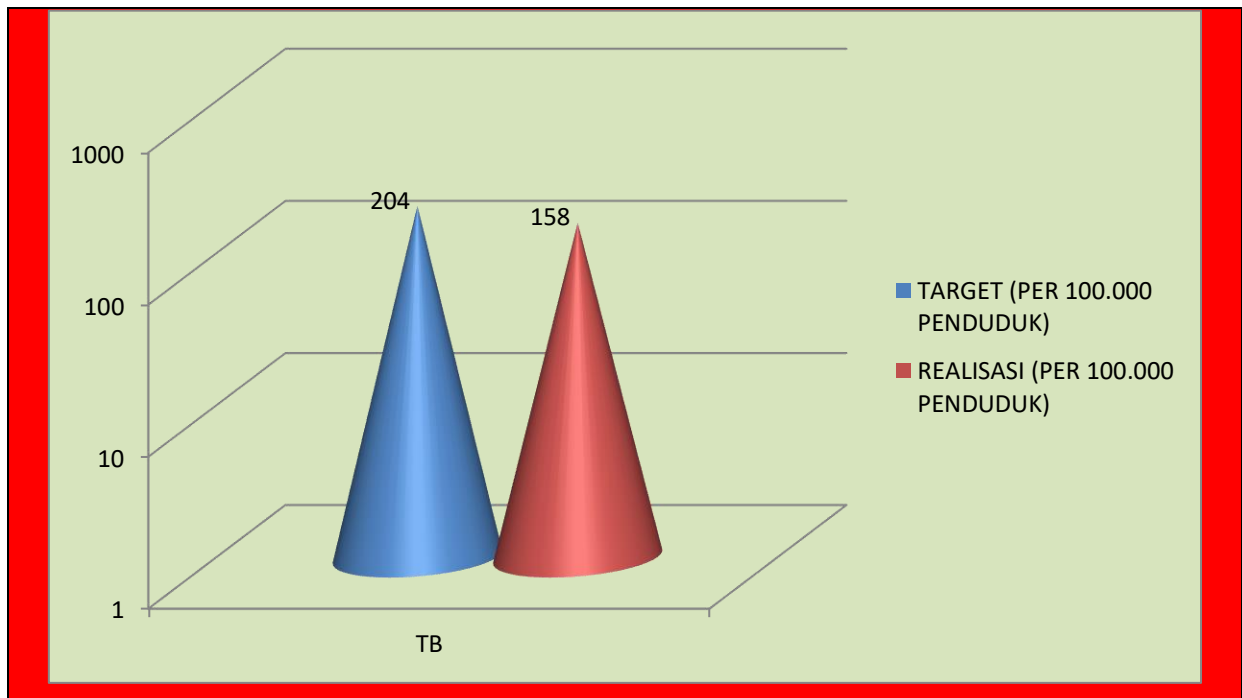
Persentase desa keluarahan STBM



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

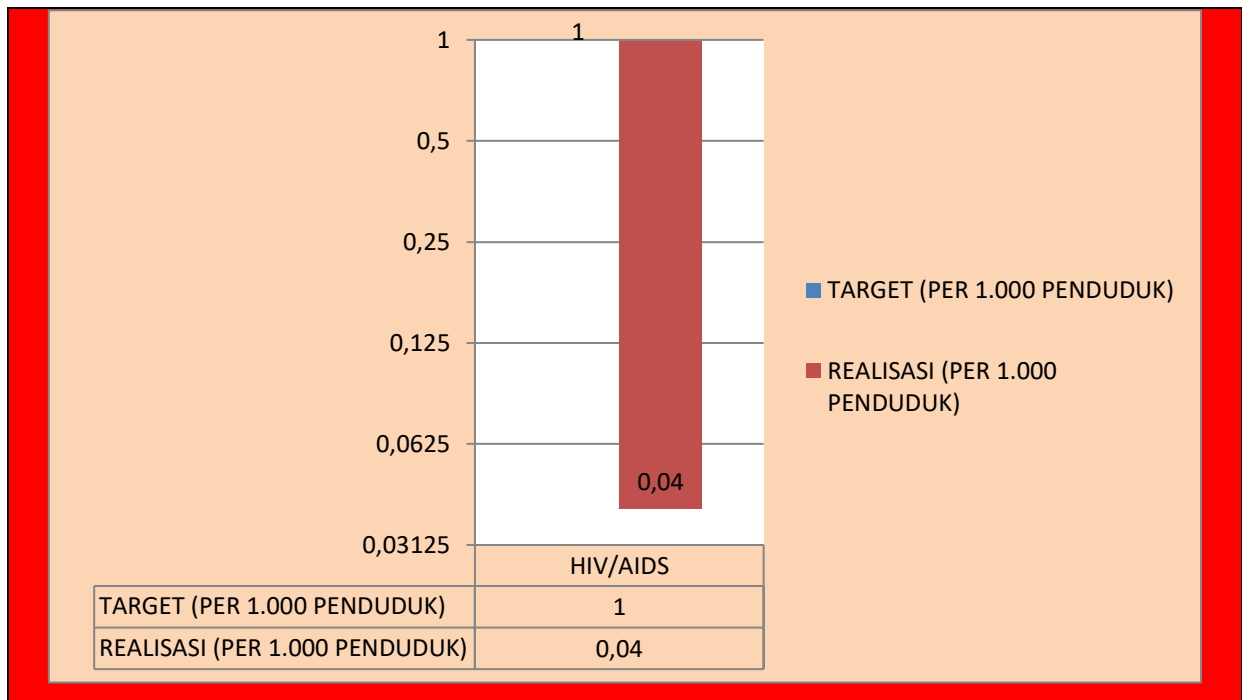
**INDIKATOR**

Prevalensi Tuberculosis



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

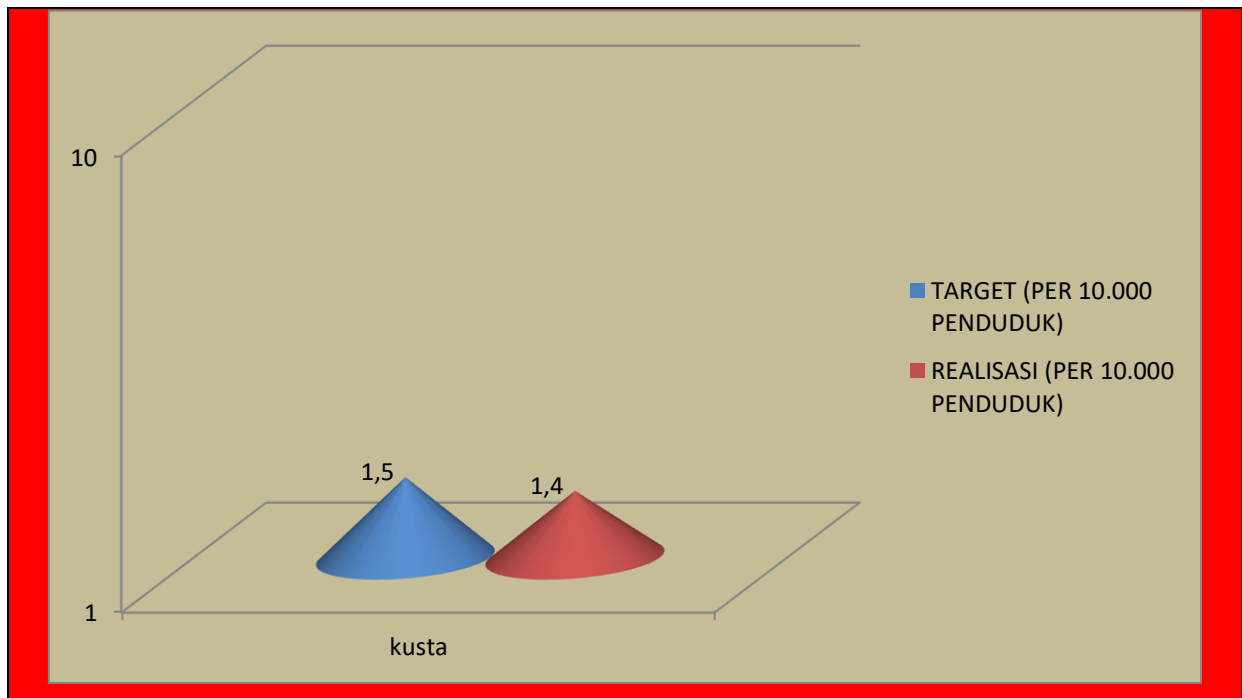
**INDIKATOR**  
Prevalensi HIV/AIDS



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

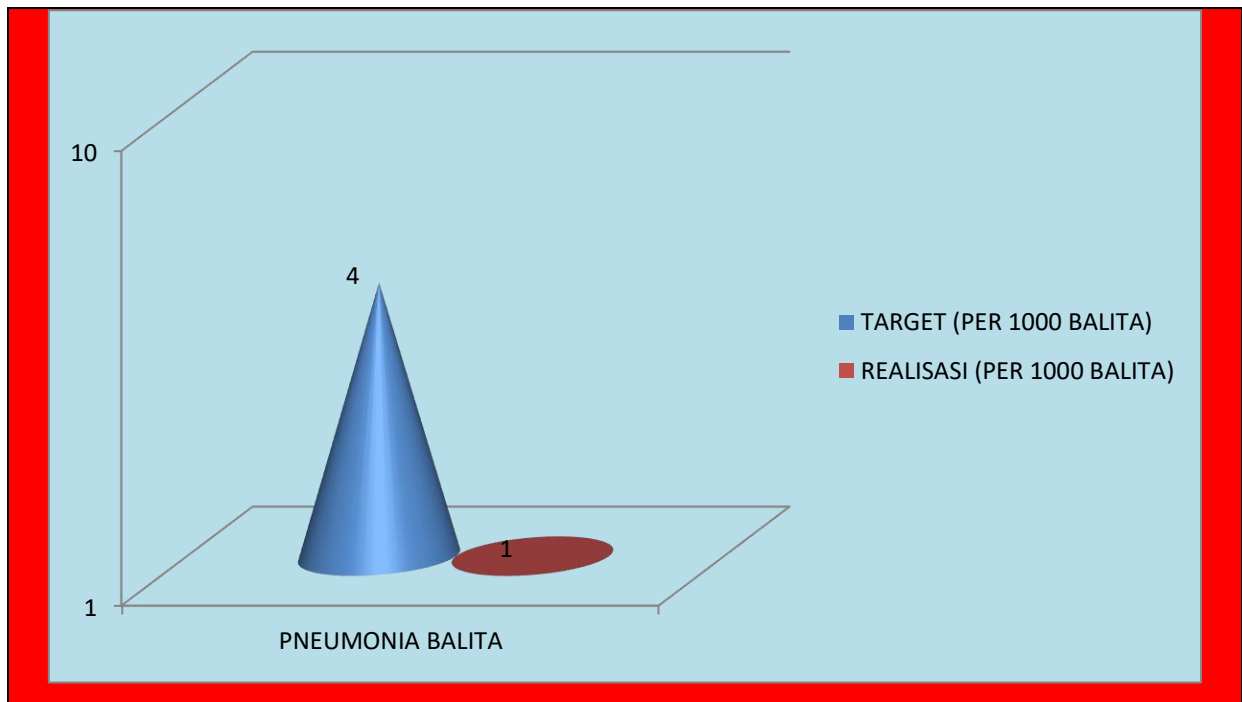
Prevalensi Kusta



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

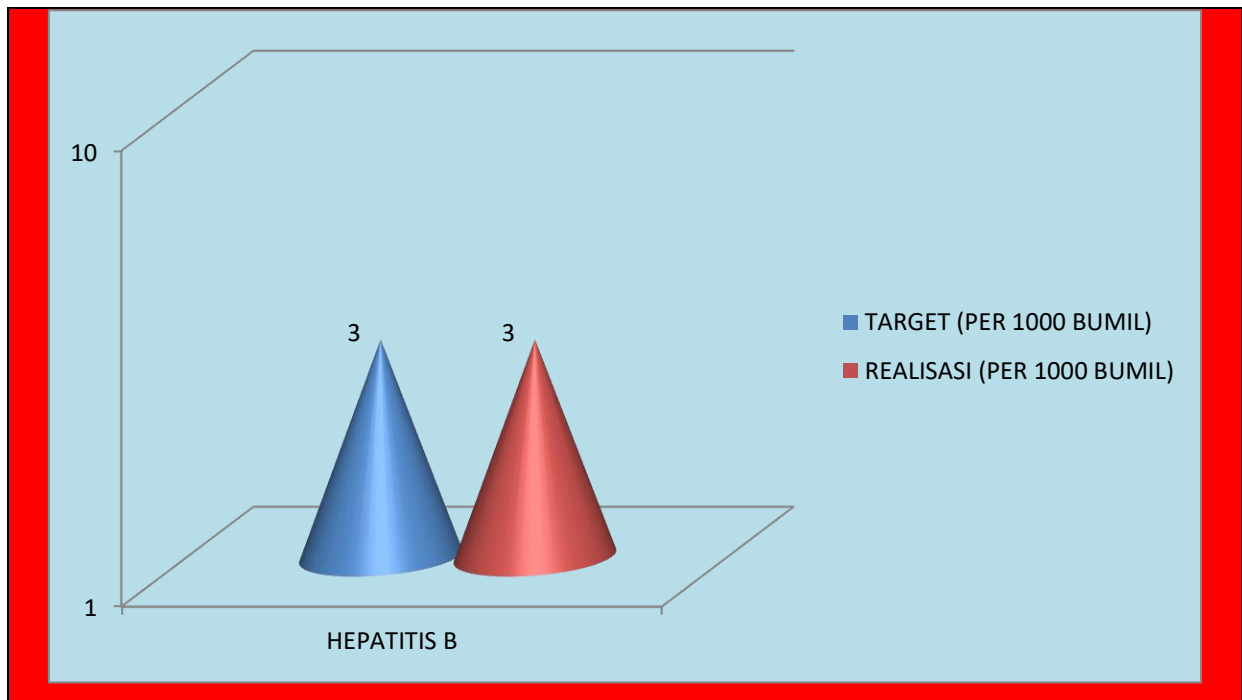
Insidensi Rate Pneumonia Balita



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

**Insidensi Rate Hepatitits pada Ibu Hamil**

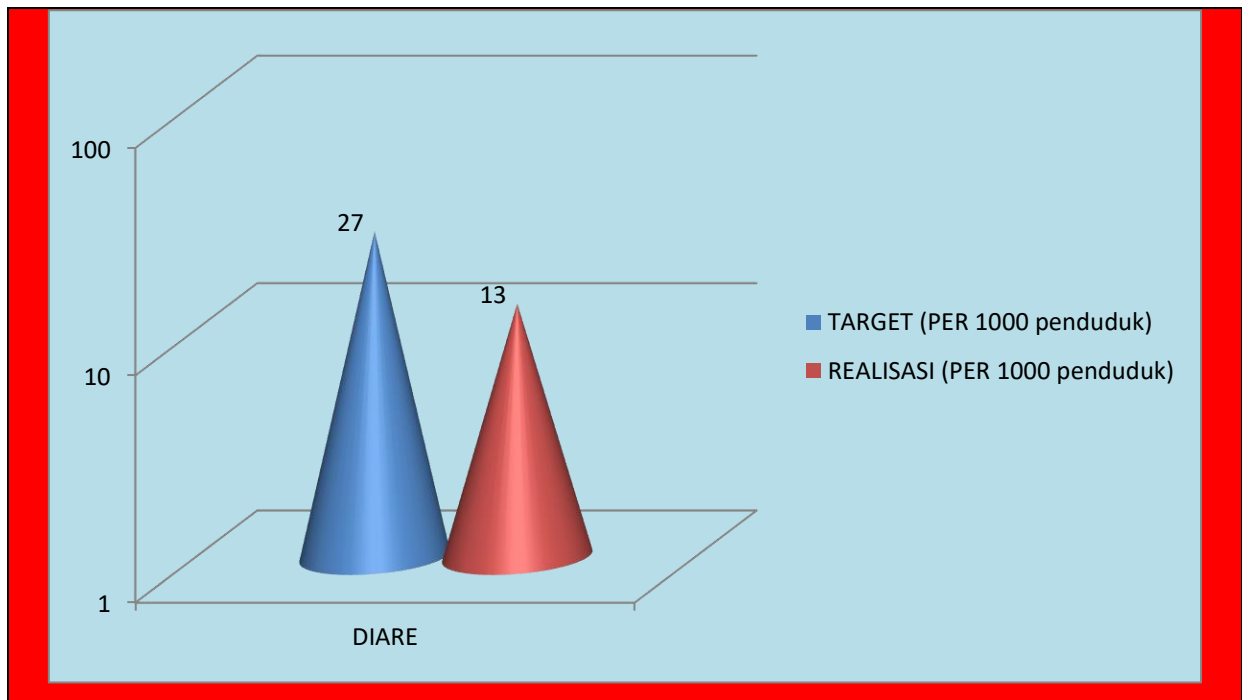




**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

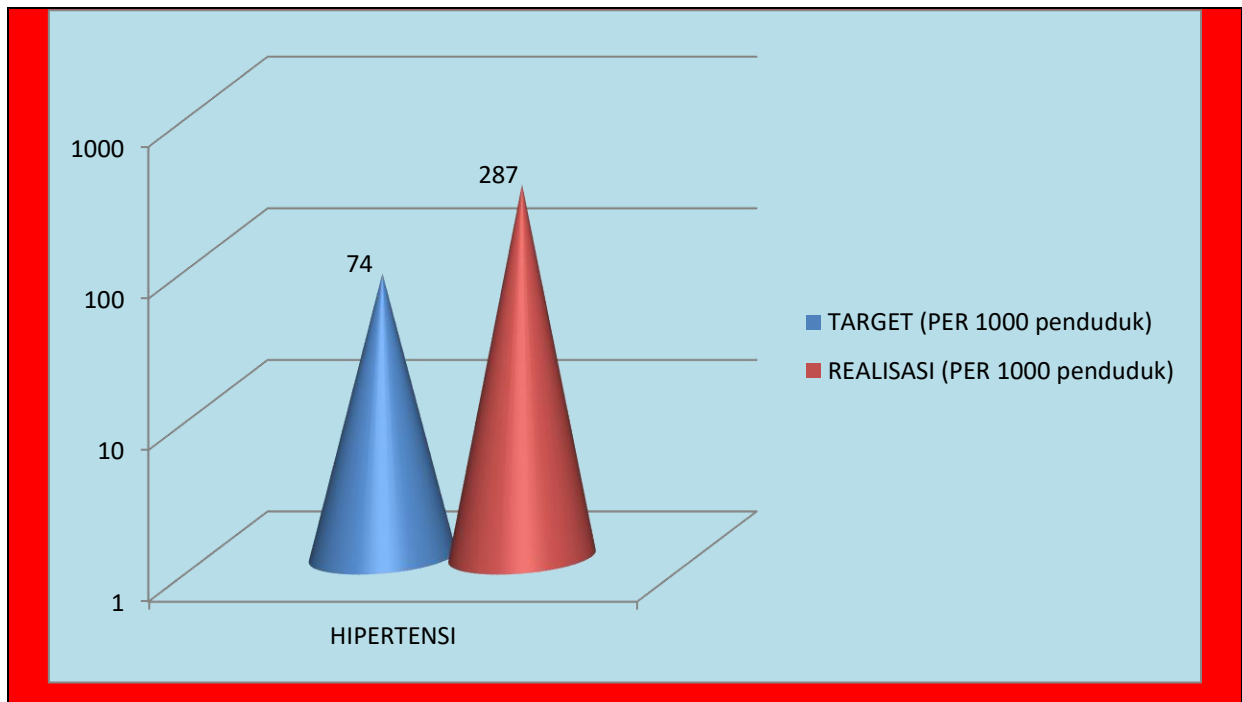
Insidensi Rate Diare



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

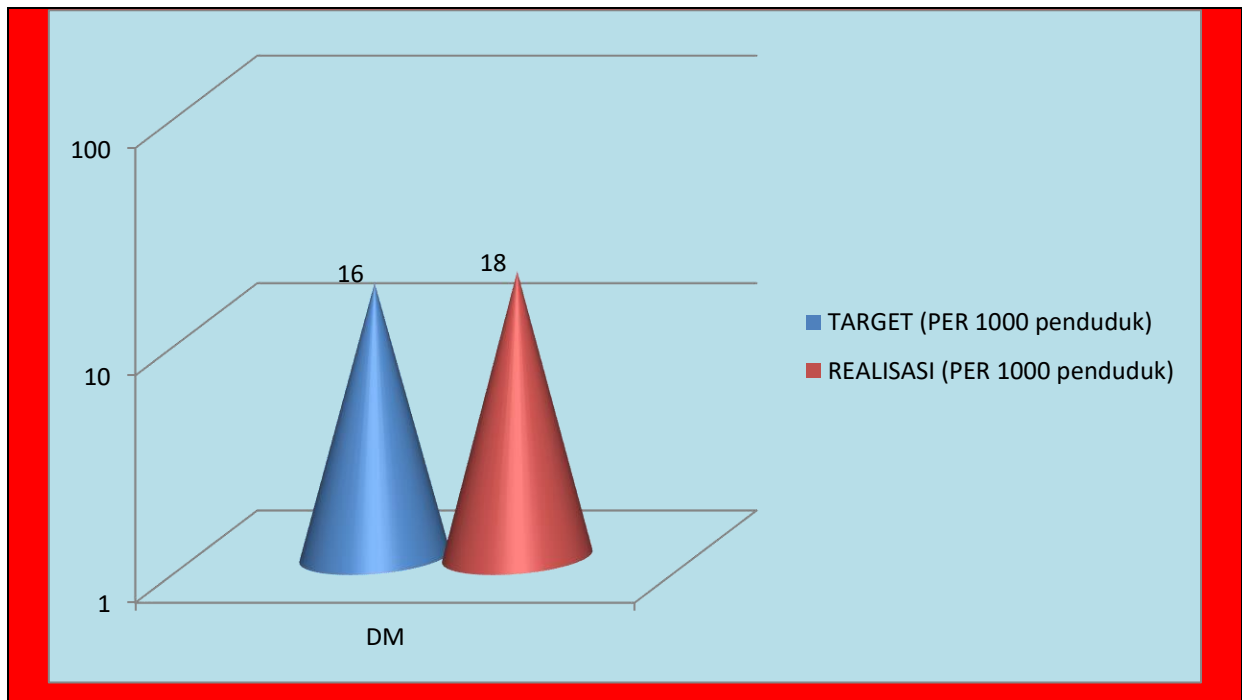
Prevalensi Hipertensi



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

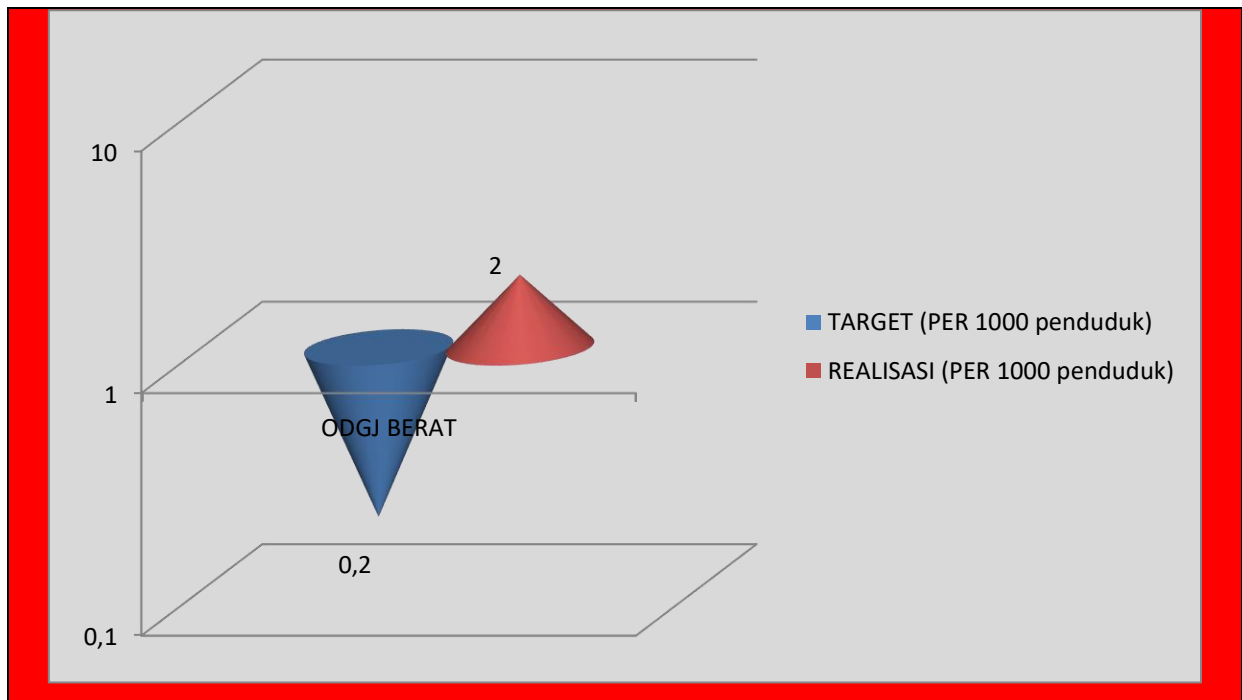
Prevalensi Diabetes Mellitus



**PROGRAM : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**INDIKATOR**

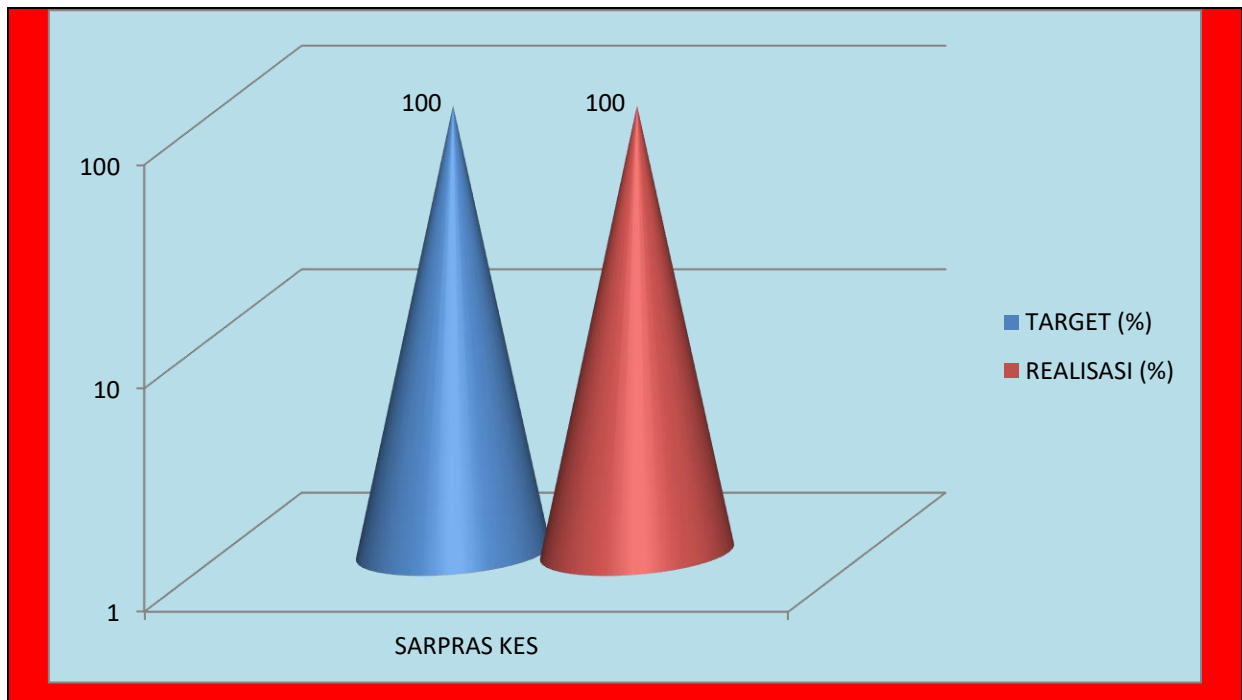
Prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat



**PROGRAM : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN**

**INDIKATOR**

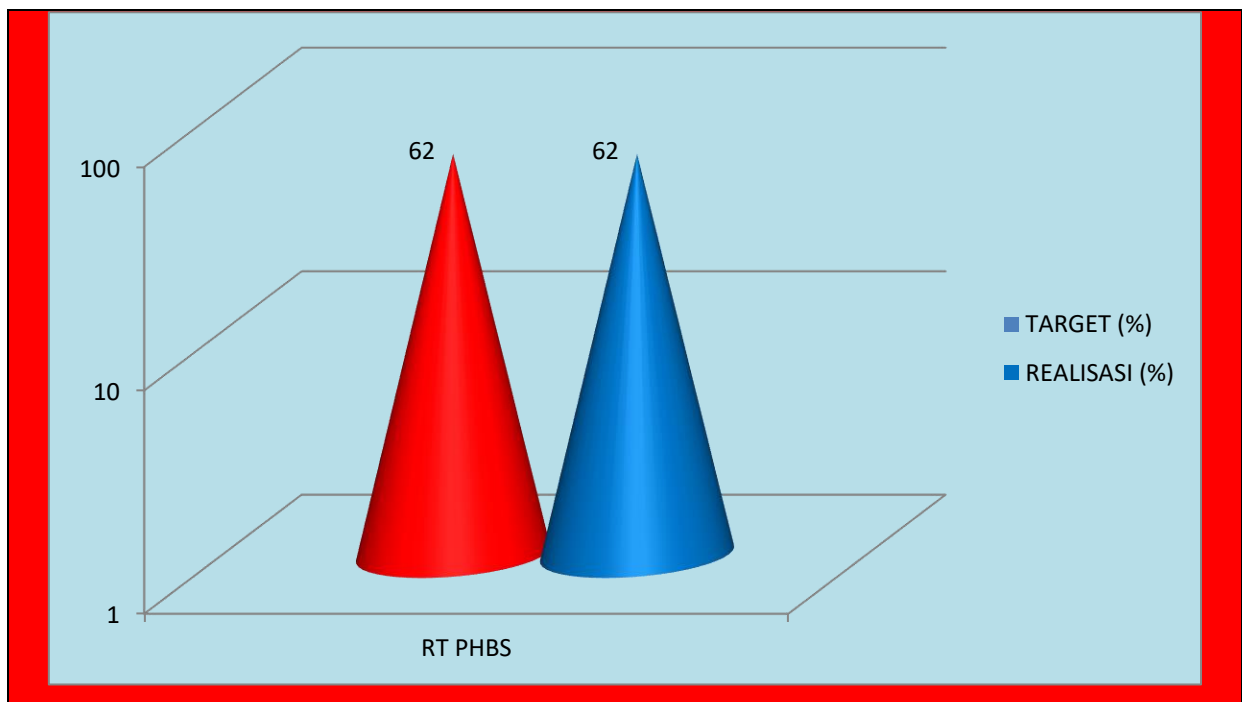
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan



**PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

**INDIKATOR**

Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



## Realisasi Kinerja Sub Kegiatan OPD Kesehatan Tahun 2021

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	UNIT	2	2
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	UNIT	1	1
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas, jejaring, dan jaringannya yang direhabilitasi (Puskesmas Pembantu)	UNIT	2	2
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	PAKET	6	5
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	JENIS	230	230
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis item obat yang disediakan/Obat esensial	JENIS	365	346
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi atau pemeliharaan	UNIT	20	20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus mendapat perawatan	PERSEN	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah FKTP yang bersinergi dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	UNIT	20	20
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage)	PERSEN	95,5	94,86
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	DOKUMEN	12	100
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kunjungan di RS Wonomulyo	PERSEN	100	100
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	JUMLAH Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Rupiah	250,000,000	60
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	PERSEN	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	82,3
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	PERSEN	100	93,1

<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	Persentase Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>	Persentase Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>63,6</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>88</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>	Persentase Pelayanan Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59 Th)	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>	Persentase Penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>42,9</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	Persentase Penduduk dengan Hipertensi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</b>	Persentase Penduduk dengan Diabetes mellitus yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</b>	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan Standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>69</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>	Persentase penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>47,46</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</b>	Persentase penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>66</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	<b>Unit</b>	20	20
	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	<b>PERSEN</b>		
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>	Jumlah Desa ODF / Desa Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (SBS)	<b>DESA</b>	55	55
<b>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	<b>PERSEN</b>	100	100
<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<b>PERSEN</b>	100	100
<b>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</b>	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	<b>PERSEN</b>	90	38,32



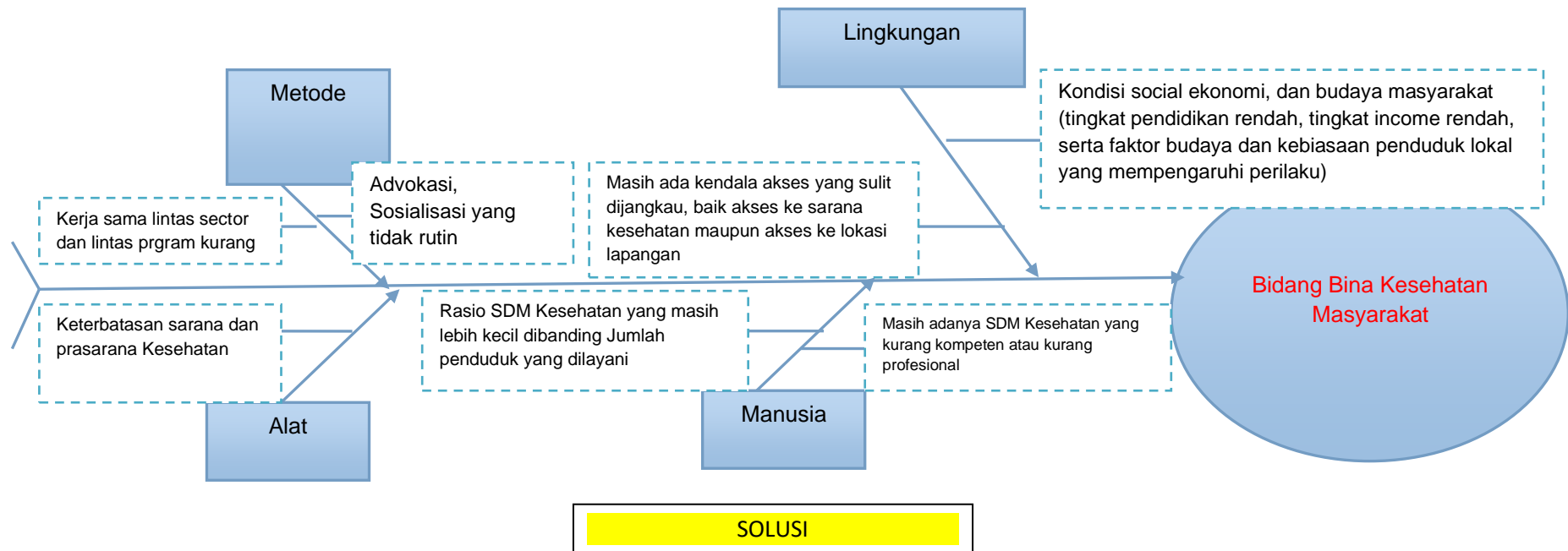
<b>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</b>	Persentase Desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dibawah 24 jam	<b>PERSEN</b>	100	100
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</b>	Jumlah Aplikasi dan Pelaporan yang dikelola	LAPORAN	8	8
<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang di pantau pada aplikasi kawal ibu hamil	ORANG	9274	7632
<b>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	UNIT	20	20
<b>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	Jumlah Puskesmas yang terkoneksi dengan SISRUITE	UNIT	20	20
<b>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Jumlah Puskesmas, Apotek, dan Toko Obat yang dilakukan pembinaan (Sarana Toko Obat)	UNIT	65	51
<b>Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	UNIT	70	64
<b>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat	UNIT	55	100
<b>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	-		
<b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</b>		<b>PERSEN</b>		
	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	DESA/KEL	167 DESA	163
<b>Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	Jumlah Posyandu strata Mandiri	UNIT	32 UNIT	10

## PERJANJIAN KINERJA ESELON II

### DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

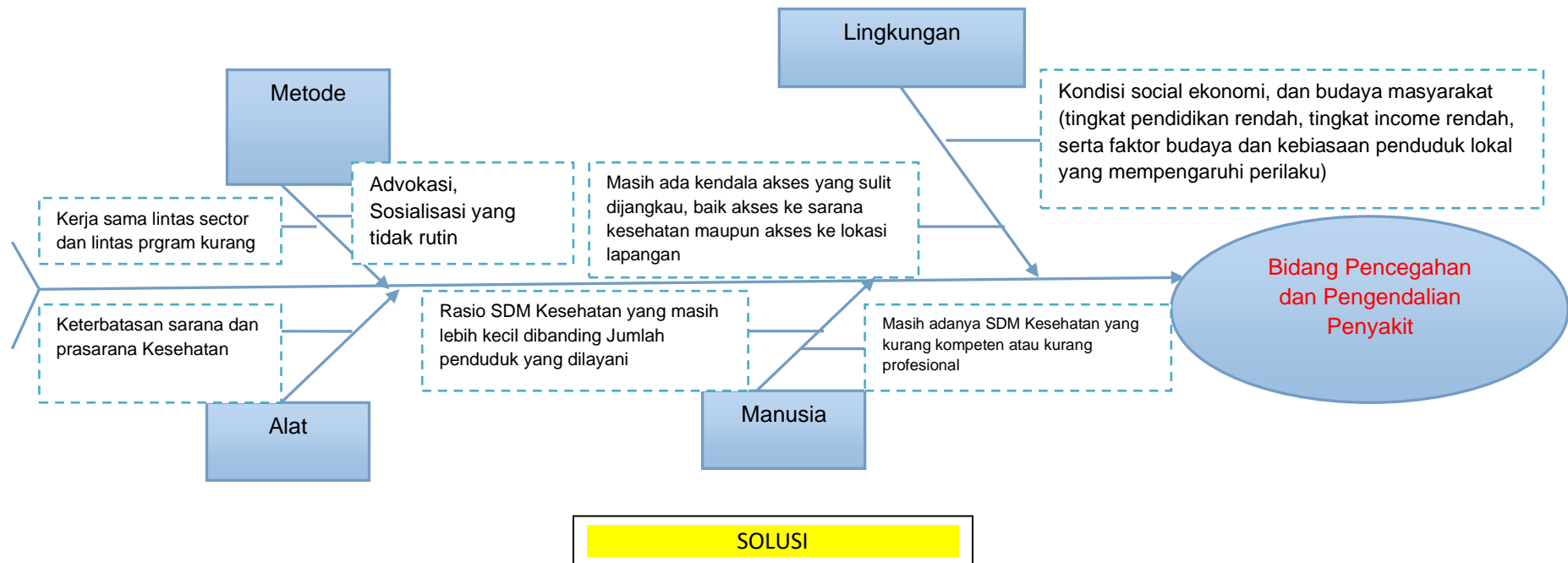
#### TAHUN 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup (AHH)	62,59 tahun	62,38 tahun
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Ketersediaan Obat essensial dan Bahan Mediasi Habis Pakai	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Mandiri dan Partisipatif	Indeks keluarga sehat (IKS)	Prasehat	Prasehat
5.	Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Case Fatality Rate Penyakit Berpotensi KLB	0%	4%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

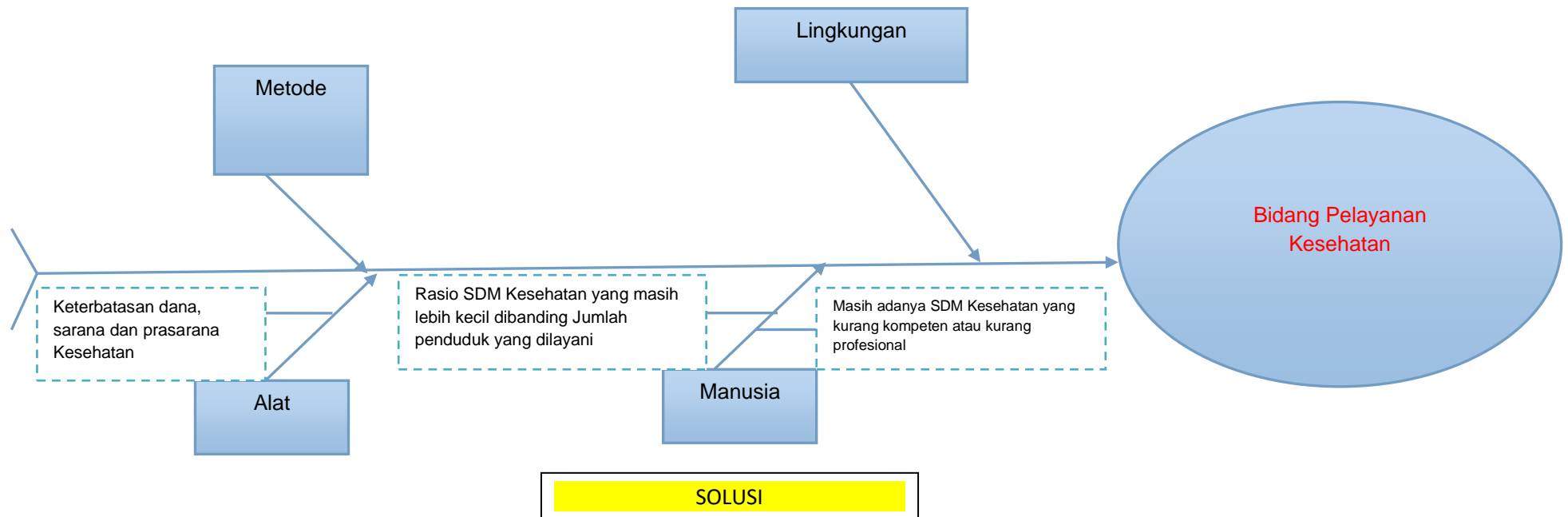


1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter interhensif.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
4. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.
5. Melakukan aksi dan advokasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.

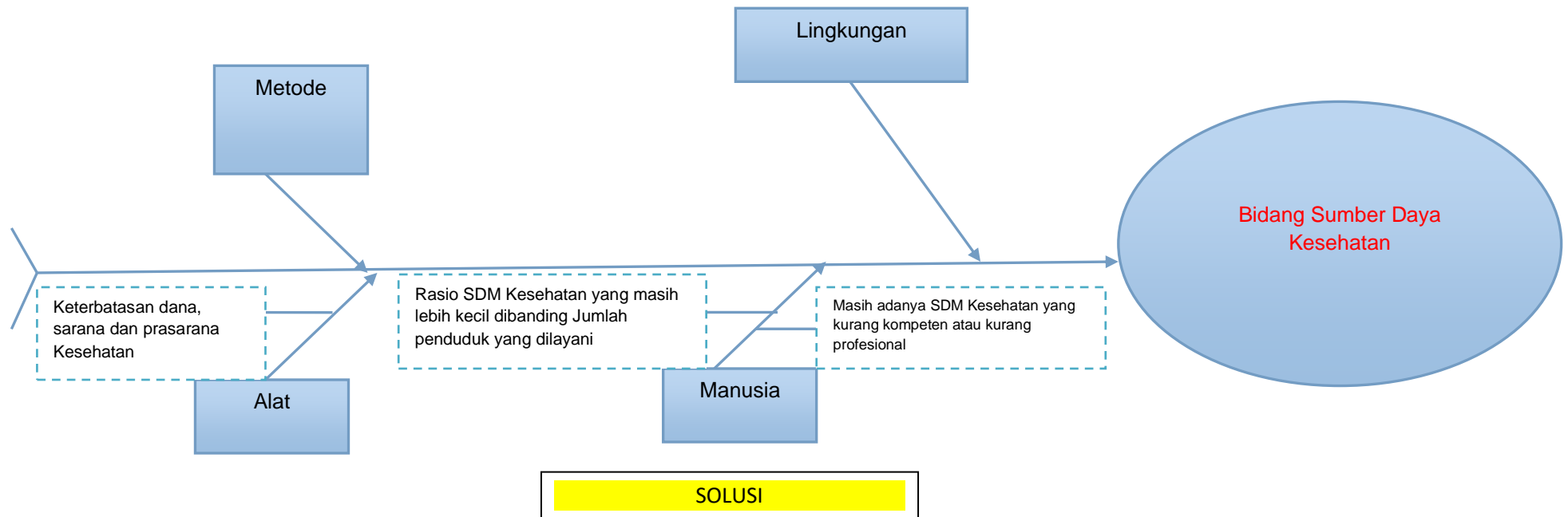
ANALISIS MASALAH SASARAN OPTIMALNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERBASIS POLA PERKEMBANGAN PENYAKIT



1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter interhensif.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
4. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.
5. Melakukan aksi dan advokasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.



1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter interhensif.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.



1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter interhensif.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.

# AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Rp.
			Rp	Rp.	
PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<b>Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	PERSEN	138,550,944,283	123,563,318,213	89.18
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP</b>	PERSEN	34,737,100,587	31,872,794,782	92
<b>Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</b>	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	UNIT	1,889,226,300	1,843,396,782	98
<b>Pengembangan Puskesmas</b>	Jumlah Puskesmas yang dibangun	UNIT	8,558,645,150	8,206,446,187	96
<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	Jumlah Puskesmas, jejaring, dan jaringannya yang direhabilitasi (Puskesmas Pembantu)	UNIT	2,396,527,281	2,396,527,281	100
<b>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	PAKET	1,443,615,700	594,024,509	41
<b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	JENIS	11,993,698,656	11,269,889,967	94
<b>Pengadaan Obat, Vaksin</b>	Jumlah jenis item obat yang disediakan/Obat esensial	JENIS	8,390,972,500	7,505,540,656	89
<b>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi atau pemeliharaan	UNIT	64,415,000	56,969,400	88

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/ Kabupaten</b>	<b>PERSEN</b>	<b>103,586,628,796</b>	<b>91,465,884,331</b>	
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	Persentase Balita Kurus mendapat perawatan	<b>PERSEN</b>	1,091,233,140	702,219,300	64
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</b>	Jumlah FKTP yang bersinergi dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	UNIT	38,545,100	38,520,100	100
<b>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>	Persentase Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage)	PERSEN	68,887,907,230	65,916,104,253	96
<b>Operasional Pelayanan Puskesmas</b>	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (PKP, RUK, RPK)	DOKUMEN	23,833,619,823	18,056,010,041	76
<b>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	Persentase Pelayanan Kunjungan di RS Wonomulyo	PERSEN	1,000,000,000	979,633,834	98
<b>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	JUMLAH Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	Rupiah	150,923,910	150,923,910	68
<b>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</b>	Persentase FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	PERSEN	1,317,821,000	717,280,000	54
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	Persentase Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	66,243,680	<b>66,047,100</b>	<b>100</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>	Persentase Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	1,708,626,000	<b>1,446,266,826</b>	<b>85</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	Persentase Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	72,820,378	<b>63,738,000</b>	<b>88</b>



<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>	Persentase Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	36,178,710	<b>33,130,000</b>	<b>92</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	17,000,003	15,640,000	<b>92</b>
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>	Persentase Pelayanan Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59 Th)	<b>PERSEN</b>	103,886,860	103,562,610	100
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>	Persentase Penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	37,505,000	36,834,700	98
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	Persentase Penduduk dengan Hipertensi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	15,829,645	15,822,500	100
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</b>	Persentase Penduduk dengan Diabetes mellitus yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	9,000,000	9,000,000	100
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</b>	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan Standar	<b>PERSEN</b>	50,210,800	45,737,705	91
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>	Persentase penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	77,997,465	62,340,700	80
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</b>	Persentase penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>PERSEN</b>	59,248,479	58,930,705	99
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	<b>Unit</b>	51,312,521	48,486,600	94

	Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	PERSEN			
<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>	Jumlah Desa ODF / Desa Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (SBS)	DESA	153,000,000	142,044,000	93
<b>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	PERSEN	47,369,920	38,173,992	81
<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	PERSEN	212,686,822	192,898,700	91
<b>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</b>	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	PERSEN	3,696,451,165	2,259,783,855	61
<b>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</b>	Persentase Desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dibawah 24 jam	PERSEN	851,211,145	266,754,900	31
Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<b>Persentase Pelaporan berbasis manual dan elektronik yang dilaporkan</b>	PERSEN	<b>138,760,000</b>	<b>138,119,800</b>	
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</b>	Jumlah Aplikasi dan Pelaporan yang dikelola	LAPORAN	108,760,000	108,134,800	99
<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang di pantau pada aplikasi kawal ibu hamil	ORANG	30,000,000	29,985,000	100
Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	<b>Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe D yang melaksanakan pelayanan kesehatan</b>	100%	<b>88,454,900</b>	<b>86,519,300</b>	
<b>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	UNIT	40,332,900	38,899,300	96
<b>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	Jumlah Puskesmas yang terkoneksi dengan SISRUITE	UNIT	48,122,000	47,620,000	99
PROGRAM : SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINMAN	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat kesehatan)</b>	100%	<b>513,558,600</b>	<b>465,742,050</b>	<b>91</b>

Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<b>Persentase Apotek, Toko Obat dan optikal, UMOT yang memiliki izin</b>	100%	15,000,000	14,920,000	99
<b>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Jumlah Puskesmas, Apotek, dan Toko Obat yang dilakukan pembinaan (Sarana Toko Obat)	UNIT	15,000,000	14,920,000	99
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	<b>Persentase Industri Rumah Tangga Produk Makanan dan Minuman yang memiliki izin</b>	100%	498,558,600	450,822,050	90
<b>Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	UNIT	498,558,600	450,822,050	90
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran, dan Depot Air Mimum (DAM)	<b>Persentase TPM dan DAM yang memiiki izin</b>	100%	0	0	
<b>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat	UNIT	0	0	100
PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<b>Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>	62 PERSEN	468,752,955	342,426,960	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Desa Siaga Aktif</b>	100%	0	0	
<b>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	-	0	0	

Pelaksanaan dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS</b>	<b>100%</b>	<b>390,752,955</b>	<b>264,706,460</b>	
<b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</b>		<b>PERSEN</b>	390,752,955	264,706,460	68
	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	DESA/KEL			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM+Q189</b>	<b>100%</b>	<b>78,000,000</b>	<b>77,720,500</b>	
<b>Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	Jumlah Posyandu strata Mandiri	UNIT	78,000,000	77,720,500	100
ADMINISTRASI UMUM			<b>57,634,420,742</b>	<b>56,819,178,494</b>	
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>57,634,420,742</b>	<b>56,819,178,494</b>	
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tingkat Daerah	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>109,802,400</b>	<b>104,573,400</b>	<b>95</b>
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	28,053,200	23,486,000	84
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</b>	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	42,560,000	42,362,000	100
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas Kinerja SKPD</b>	Jumlah dokumen LAKIP	Dokumen	17,482,400	17,081,600	98
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	21,706,800	21,643,800	100
Administrasi Keuangan	<b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>55,976,218,342</b>	<b>55,215,586,485</b>	
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah pegawai	jumlah	52,885,020,742	52,196,088,885	99
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	Jumlah tenaga kontrak daerah	jumlah	3,040,800,000	2,969,100,000	98

<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	20,698,800	20,698,800	100
<b>Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	29,698,800	29,698,800	100
Administrasi Umum Perangkat daerah	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang di susun</b>	<b>100%</b>	<b>112,840,000</b>	<b>112,839,994</b>	
<b>Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	LPD	112,840,000	112,839,994	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang di susun</b>	<b>100%</b>	<b>201,400,000</b>	<b>170,891,748</b>	
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	BULAN	159,200,000	128,691,748	81
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	Orang	42,200,000	42,200,000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang di susun</b>	<b>100%</b>	<b>1,234,160,000</b>	<b>1,203,077,667</b>	
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan pajak kendaraan	Unit	124,160,000	93,082,167	75
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Unit	10,000,000	9,995,500	100
<b>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</b>	Jumlah pelayanan UTD dan PMI	<b>Unit</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>100</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>197,167,676,580</b>	<b>181,178,456,517</b>	<b>92</b>

TERIMA KASIH